

# PENGALAMAN PENDANAAN NEGARA KEPADA CSO DI 10 NEGARA



2022



## **PENGALAMAN PENDANAAN NEGARA KEPADA CSO DI 10 NEGARA**

### **Penulis utama :**

Purnama Adil Marata

### **Penulis :**

Sugeng Bahagijo

Bona Tua Parlinggomon P.

Denisa Amelia Kawuryan

Diterbitkan oleh:

International NGO Forum on Indonesian Development

Februari 2022

Alamat :

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540 -  
Indonesia

Telepon (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Email: [office@infid.org](mailto:office@infid.org)

Laman: [www.infid.org](http://www.infid.org)

Cetakan Pertama, Februari 2022

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Belajar dari pengalaman sepuluh negara, sekurang-kurangnya ada tujuh topik menarik yang dapat ditarik dari praktik baik pendanaan CSO di sektor publik, meliputi:

- 1. Demokrasi dapat berjalan dengan baik** dalam kondisi **negara kuat dan masyarakat sipil yang juga kuat**. Sistem dan institusi demokrasi merupakan sebuah proses yang tidak akan pernah selesai dalam konteks perbaikan kualitas dan keberlanjutannya. Atas alasan inilah pemerintah memperkuat keberadaan masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil dan menempatkannya dalam proses politik.
- 2. Pendanaan di sektor publik menjadi instrumen penting** dari kualitas dan keberlanjutan sistem demokrasi di banyak negara. Tidak mengherankan, pemerintah di sepuluh negara mengalokasikan **dana publik dalam APBN** yang khusus didedikasikan bagi CSO. Pemerintah bisa berubah dari waktu ke waktu, tetapi, keberadaan CSO tetap dihargai dan pendanaan bagi mereka tetap ada.
- 3. Dinamika politik**. Hal yang membedakan antara pemerintah di suatu negara pada satu periode dengan periode lain adalah tingkat kedalaman partisipasi CSO dalam proses politik dan besaran dana publik yang digelontorkan untuk mereka. Partai kanan/konservatif cenderung membatasi partisipasi CSO dan dana publik yang dialokasikan sedikit, sedangkan partai kiri/liberal/sosdem cenderung mengambil posisi sebaliknya. Inisiatif awal pendanaan bisa muncul dari negara atau merupakan tuntutan dari masyarakat sipil. Latar belakang sejarah, kondisi struktural, dan tradisi merupakan hal-hal yang membedakan pengalaman negara satu dengan yang lain.
- 4. Kecuali Jepang, regulasi atas CSO minimal, atau bahkan tidak ada**. Jikapun ada, regulasi sekedar untuk menjawab kebutuhan praktis, yaitu dalam konteks (pengecualian) pajak dan untuk mendorong akuntabilitas semata. Kesepakatan global, terutama di negara-negara OECD yang memelopori prinsip transparansi dan akuntabilitas, memiliki pengaruh pada dinamika internal sepuluh negara ini.

5. **Sebagian negara memiliki kantor atau unit khusus pemerintah** yang didedikasikan untuk menjalin kemitraan dengan CSO. Jikapun ada, pembentukan lebih merupakan bagian dari kepentingan internasional, yaitu kerja sama pembangunan dengan negara sahabat. Negara yang tidak memilikinya, fungsi pengelolaan melekat pada kementerian atau lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal.
6. **Dalam hal *delivery* dan mekanisme pendanaan, ada beberapa negara yang menggunakan organisasi payung** sebagai bagian mekanisme pengajuan dan distribusinya. Ada juga yang memilih menggelontorkan dana pada CSO besar yang menjadi prioritas mereka. Salah satu alasan adalah untuk mengurangi biaya transaksi. Sebaliknya, dinamika internal yang memperlihatkan relasi antara negara dengan masyarakat sipil juga memengaruhi kebijakan dan strategi yang diusung pemerintah saat terlibat dalam kerja sama pembangunan internasional dan pengelolaan ODA. Tabel 1 dan 2 memperlihatkan pendanaan menurut mekanisme penyalurannya, yaitu langsung ke CSO maupun disalurkan melalui CSO. Mekanisme penyaluran kedua menjadikan CSO berperan sebagai mitra pelaksana kebijakan negara dalam kerja sama pembangunan internasional.
7. Berdasarkan data OECD sepanjang 2010-2019, **terlihat 10 negara mengalokasikan ODA lebih banyak kepada CSO dalam negeri** dan CSO internasional. **Sangat sedikit dana publik disalurkan kepada CSO di negara berkembang yang menjadi target kerja sama pembangunan mereka.** Pada periode yang sama, Amerika Serikat sama sekali tidak memberikan limpahan dana publik kepada CSO di negara berkembang.

# KATA PENGANTAR

Dokumen ini disusun oleh International NGO Forum on Indonesia Development (INFID), sebagai bagian dari upaya Kelompok Kerja Pendanaan LSM Indonesia untuk memperkuat peran dan keberlanjutan CSO di Indonesia, terutama melalui kebijakan yang mendukung pendanaan negara kepada CSO di Indonesia. Sejak Januari 2021 yang lalu, Pokja Pendanaan LSM telah bekerja untuk menyajikan bukti-bukti dan pilihan kebijakan yang *enabling* kepada peran dan keberlanjutan CSO di Indonesia

Beberapa latar belakang yang mendorong Pokja Pendanaan LSM, antara lain *Pertama*, pandemi yang akan memasuki tahun ke-3 tidak saja melumpuhkan ekonomi dan industri secara umum, tetapi juga melemahkan keberlanjutan CSO, terutama mereka yang berbasis di provinsi dan kabupaten.

*Kedua*, sebelum pandemi, kinerja demokrasi di Indonesia mengalami stagnasi, demikian juga dengan indeks korupsi. Oleh karena itu, memperkuat dan merawat demokrasi perlu dilakukan, salah satunya dengan memastikan peran dan keberlanjutan CSO.

*Ketiga*, peran nyata CSO di Indonesia selama 20 tahun pascareformasi, sudah diakui, tetapi kebijakan untuk mendukungnya belum banyak dilakukan. Di pihak lain, peran nyata yang dijalankan CSO tak luput dari tantangan, baik internal maupun eksternal. Salah satu tantangan internal yang dihadapi CSO di berbagai negara adalah mengenai keberlanjutan kelembagaan yang erat kaitannya dengan hal pendanaan.

*Keempat*, pemerintah Indonesia melalui Bappenas dan KSP telah membuka jalan bagi rencana pemerintah RI untuk memperkuat demokrasi dan peran serta keberlanjutan CSO. Oleh karena itu, diperlukan bahan-bahan kajian untuk menopang pengambilan kebijakan.

Studi ini mencoba menelusuri sejauh mana praktik baik dan pengalaman pendanaan negara kepada CSO di 10 negara, di beberapa kawasan, mulai dari Amerika, Eropa (Swedia, Inggris, Belanda, Jerman, Norwegia, dan Irlandia), Asia (Korea Selatan dan Jepang), dan Australia. Pertimbangan praktik tersebut meliputi; *pertama*, mengenai regulasi atas CSO; *kedua*, mengenai jenis dan mekanisme pendanaan; dan *ketiga*,

mengenai entitas pengelola dana publik bagi CSO. Penyusunan dokumen dilakukan selama dua bulan (Januari hingga Februari 2022) melalui pendekatan studi literatur.

Pokok bahasan dalam buku ini terdiri dari tiga bab utama. Bab pertama tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metode, dan pertanyaan kunci. Bab kedua studi literatur dari 10 negara. Bab ketiga membahas refleksi dan perbandingan praktik pendanaan negara kepada CSO di 10 negara.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Tim Penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas dukungan penulisan dokumen ini.

Jakarta, 16 Februari 2022  
Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>9</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>11</b>
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Tujuan	13
1.3. Pertanyaan Kunci	13
1.4. Metode Kerja	13
<b>BAB 2. PENGALAMAN PENDANAAN NEGARA KEPADA CSO DI 10 NEGARA</b>	<b>17</b>
2.1. Pendanaan CSO di Swedia	17
2.2. Pendanaan CSO di Amerika Serikat	21
2.3. Pendanaan CSO di Inggris	25
2.4. Pendanaan CSO di Korea Selatan	28
2.5. Pendanaan CSO di Belanda	30
2.6. Pendanaan CSO di Jerman	33
2.7. Pendanaan CSO di Norwegia	37
2.8. Pendanaan CSO di Australia	40
2.9. Pendanaan CSO di Jepang	43
2.10. Pendanaan CSO di Irlandia	47
<b>BAB 3. REFLEKSI DAN PENUTUP</b>	<b>53</b>
Daftar Pustaka	61

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi pendanaan Swedia kepada CSO	21
Tabel 2. Alokasi pendanaan Amerika Serikat kepada CSO	25
Tabel 3. Alokasi pendanaan Inggris kepada CSO	28
Tabel 4. Alokasi pendanaan Korea Selatan kepada CSO	30
Tabel 5. Alokasi pendanaan Belanda kepada CSO	33
Tabel 6. Alokasi pendanaan Jerman kepada CSO	37
Tabel 7. Alokasi pendanaan Norwegia kepada CSO	40
Tabel 8. Alokasi pendanaan Australia kepada CSO	43
Tabel 9. Alokasi pendanaan Jepang kepada CSO	47
Tabel 10. Alokasi pendanaan Irlandia kepada CSO	49
Tabel 11. Perbandingan bantuan pendanaan resmi pembangunan dari 10 negara yang disalurkan kepada CSO, 2010-2019	50
Tabel 12. Perbandingan bantuan pendanaan resmi pembangunan dari 10 negara yang disalurkan melalui CSO, 2010-2019	51
Tabel 13. Matriks komparasi praktik pendanaan negara kepada CSO di 10 negara	54



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Civil Society Organization* (CSO) memiliki sejarah panjang dan menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. CSO memainkan peranan penting, khususnya untuk mengawasi jalannya *good governance*, terjaminnya pelayanan publik yang optimal, transparansi institusi publik, dan peningkatan kualitas hidup dalam berbagai dimensi dalam masyarakat.

Di antara relasi kekuasaan antara pemerintah dengan publik, CSO memainkan peran untuk dua belah pihak dan berada di tengah. Di satu sisi, CSO melakukan pendampingan masyarakat sipil agar haknya terpenuhi dan tidak dirugikan, di sisi lain CSO berusaha menjadi mitra pemerintah agar bisa bekerja efisien dan efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. CSO adalah lembaga nirlaba yang beroperasi dalam kerangka hukum serta bekerja melalui program pengembangan yang menguntungkan masyarakat selain anggota-anggota mereka sendiri dan dibiayai oleh sumber di luar organisasi<sup>1</sup>.

Peran CSO dalam mendorong partisipasi dipandang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Peran tersebut mencakup berbagai bentuk pemberdayaan, pendampingan, dan penyampaian kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Sementara, bagi pemerintah, manfaat keberadaan CSO tidak banyak berbeda, tetapi dengan tekanan terkait pembangunan kapasitas, terutama bagi lembaga pemerintahan serta pendampingan penyusunan kebijakan.

Terdapat berbagai dinamika dan tantangan bagi CSO untuk tetap berkembang dan menyeimbangkan kebutuhan antara masyarakat dengan pemerintah. Kapasitas program dan kapasitas organisasi CSO misalnya menghadapi tuntutan untuk terus berkembang, yang salah satu

---

<sup>1</sup> Mansour Fakih. *NGOs in Indonesia: Issues in Hegemony and Social Change*. Occasional Paper Series on Non-Governmental Organizations. Center for International Education, University of Massachusetts Amherst, 1991.

hambatannya adalah penguatan pada aspek pendanaan. Tren CSO di berbagai negara, termasuk di Indonesia, selama ini sebagian besar sumber pendanaan CSO berasal dari dana eksternal dan bersifat hibah maupun donasi.

Pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang lebih besar lagi dalam aspek finansial. Krisis kesehatan, restriksi mobilisasi, perlambatan kegiatan ekonomi menguji ketahanan organisasi dan kapasitas CSO. CSO di Eropa Selatan dan Asia misalnya, Covid-19 mengakibatkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pendanaan lembaga CSO. Adanya temuan menyusutnya ruang sipil untuk berekspresi dikarenakan tuduhan berita “tidak akurat” dan “tidak benar” diluar otoritas negara/pemerintah<sup>2</sup>. Di Indonesia, berdasarkan survei INFID (2020), pandemi Covid-19 mengakibatkan lebih dari separuh (72%) CSO terkena dampak negatif keuangan dan sebagian masuk ke dalam fase kritis (23%), yaitu tidak lagi memiliki kemampuan menjalankan organisasi.

Ide untuk mendorong negara agar mengeluarkan kebijakan pendanaan bagi CSO telah menjadi opsi bagi keberlanjutan CSO di beberapa negara. Gagasan ini mendapat dukungan dari banyak CSO, tetapi tetap ada kekhawatiran seperti pertimbangan independensi CSO terhadap konsistensi dalam menerima program yang sejalan dengan visi dan misinya. Banyak pihak yang menyatakan perlunya perencanaan dan kehati-hatian dalam mewujudkan gagasan tersebut.

Studi pengalaman pendanaan negara kepada CSO di 10 negara merupakan upaya untuk melihat lebih jauh tata kelola dan mekanisme pendanaan negara dapat dilakukan. Dokumen ini merupakan bagian dari proses dan kerja dari Kelompok Kerja Pendanaan LSM Indonesia, untuk menjadi tambahan bukti bagi pengambil kebijakan. Adanya bukti keberhasilan pendanaan negara kepada CSO yang telah dilakukan, akan menginspirasi dan mempercepat kerangka regulasi, dalam hal ini peraturan presiden, sebagai payung hukum pelaksanaannya.

---

<sup>2</sup> <https://afew.org/wp-content/uploads/2020/10/COVID-impact-survey-report-AFEW-International-2.pdf> diakses pada 8 Februari 2022

## 1.2. Tujuan

- a. Mendapatkan data dan informasi mengenai ragam, skema, dan operasi praktik baik pendanaan negara kepada CSO di 10 negara.
- b. Memberikan gambaran mengenai kebermanfaatan pendanaan negara kepada CSO di 10 negara.
- c. Memberikan rekomendasi untuk mendorong pendanaan negara kepada CSO yang efektif dan berkelanjutan.

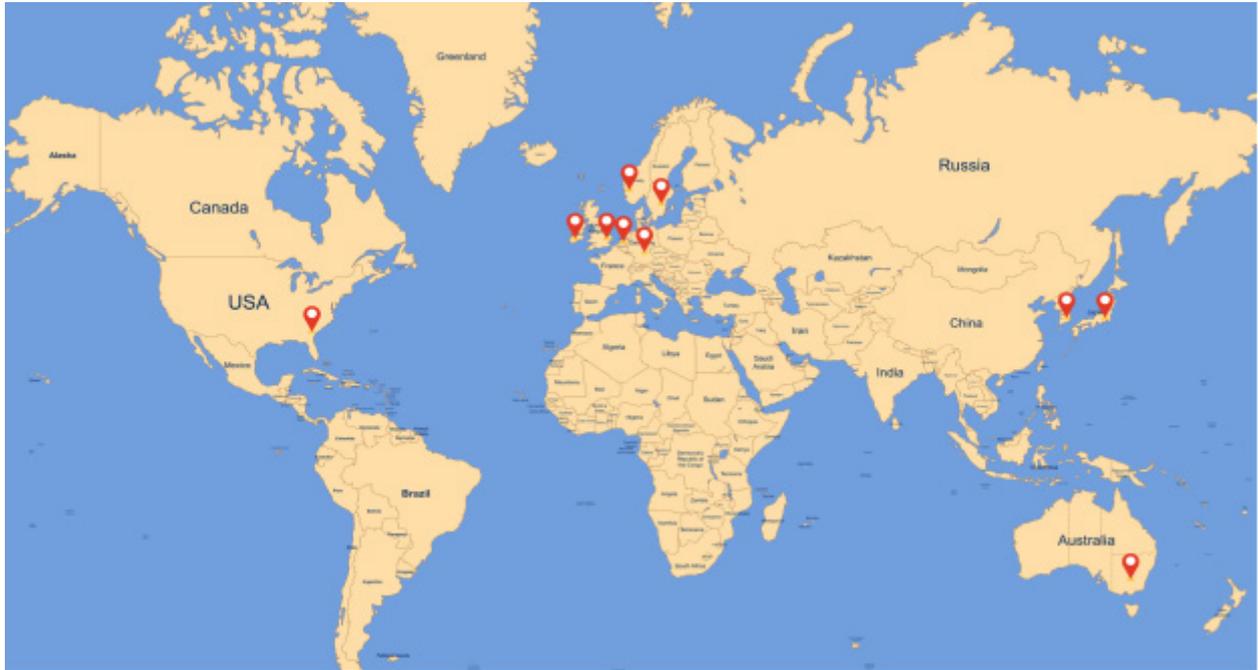
## 1.3. Pertanyaan Kunci

- a. Bagaimanakah kebijakan pemerintah terhadap peran dan kontribusi CSO di 10 negara?
- b. Bagaimanakah ragam jenis dan mekanisme pendanaan negara kepada CSO di 10 negara?
- c. Bagaimanakah pelaksanaan entitas lembaga/pengelola dana publik untuk CSO di 10 negara?

## 1.4. Metode Kerja

- a. Studi dirancang dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan *desk research*.
- b. Kegiatan penyusunan studi dilakukan sepanjang periode bulan Januari 2022 hingga bulan Februari 2022.
- c. Jumlah rujukan literatur sebanyak 62 buah, terdiri dari:
  - a. Dokumen sebanyak 36 buah,
  - b. Sumber daring /*online* sebanyak 26 buah
- d. Pemilihan 10 negara berdasarkan :
  - a. Pertimbangan kawasan (Asia, Amerika, Eropa, dan Australia)
  - b. Telah 10 tahun melakukan pendanaan negara kepada CSO (terlampir dalam grafik di tiap negara).
  - c. 10 negara tersebut yaitu:
    1. Swedia
    2. Amerika Serikat
    3. Inggris
    4. Korea Selatan
    5. Belanda
    6. Jerman
    7. Norwegia
    8. Australia

- 9. Jepang
- 10. Irlandia







# BAB 2

## PENGALAMAN PENDANAAN NEGARA KEPADA CSO DI 10 NEGARA

### 2.1. Pendanaan CSO di Swedia

Pendanaan publik bagi CSO merupakan instrumen penting bagi Swedia dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Hal ini tidak terlepas dari cara pandang terhadap keberadaan masyarakat sipil. Dasar dari kebijakan masyarakat sipil adalah masyarakat sipil yang kuat merupakan prasyarat bagi demokrasi.

Demokrasi di Swedia berakar pada gerakan masyarakat sipil dan tradisi keterlibatan CSO yang kuat. Setiap individu dapat berkumpul dan terlibat dalam masyarakat sipil untuk mendorong suatu masalah sosial yang penting untuk dibahas dan dipecahkan. Ada tiga komponen penting yang dapat dijalankan oleh mereka, yaitu partisipasi warga negara di arena publik; penguatan masyarakat; dan pembangunan.

Tidak ada kerangka regulasi spesifik dari negara yang mengatur keberadaan CSO di negeri ini. Tidak ada kewajiban mendaftarkan organisasi ini pada otoritas negara. Kebebasan berorganisasi ditetapkan oleh Konstitusi Swedia pada Bab 2, Pasal 1 tentang Instrumen Swedia tentang Pemerintah. Berbeda dengan Pasal 1, Pasal 2 justru menawarkan hal sebaliknya, yaitu menjamin setiap orang berhak untuk tidak menjadi bagian suatu organisasi.<sup>3</sup> Organisasi masyarakat sipil mengatur diri mereka sendiri tanpa intervensi negara.

Hubungan antara masyarakat sipil dengan negara tidak serta-merta berjalan sesuai dengan ide dasar dan tradisi di atas berdasarkan tafsir masing-masing pihak. Setelah berbagai kritik bermunculan, misalnya, pada bulan Desember 2009, Pemerintah Swedia mengajukan RUU berjudul Kebijakan untuk Masyarakat Sipil (RUU Pemerintah 2009/10:55) kepada *Riksdag* (Parlemen).

---

<sup>3</sup> Pontus Modéer and Henrik Alffram, 2013, "Sweden Case Study: Swedish CSOs and Relationships with the Government of Sweden in Development Cooperation," United Nations Development Programme, *Working with Civil Society in Foreign Aid Possibilities for South-South Cooperation?* Beijing, hal. 241

Kebijakan baru di atas diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melihat pentingnya masyarakat sipil, mengembangkan dan memperjelas hubungan antara negara dengan masyarakat sipil, dan mengambil pendekatan menyeluruh terhadap isu-isu umum mengenai masyarakat sipil dan kondisinya. CSO dianggap sebagai pelaku kunci pembangunan. Pengalaman, keahlian, tanggapan yang cepat dan fleksibel yang mereka miliki dapat mengisi kesenjangan yang ada saat pemerintah memberikan layanan publik kepada warga.<sup>4</sup>

Akomodasi atas suara masyarakat sipil semakin menguat. Mereka juga semakin mengambil peran penting di area pembangunan dan urusan luar negeri. Ada sederet kebijakan yang merefleksikan menguatnya peran tersebut. 'Kerangka Kebijakan Bantuan Swedia' yang ditetapkan pada 2013 merupakan fondasi penting.

Draf dokumen ini disusun berdasarkan proses konsultasi dengan organisasi masyarakat sipil dan dalam proses finalisasinya Pemerintah Swedia kembali mendengarkan umpan-balik dan masukan dari mereka. Hal ini semakin dipertegas dengan komitmen bersama antara pemerintah dengan CSO Swedia untuk memperkuat dialog dan kolaborasi di bidang kerja sama pembangunan pada tahun 2015.

'Kerangka Kebijakan untuk Kerja Sama Pembangunan dan Bantuan Kemanusiaan' yang ditetapkan pada 2016 dirumuskan melalui proses yang kurang-lebih sama dan selanjutnya menjadi suatu pola. Hal ini terjadi pada 'Kerja sama Organisasi Masyarakat Sipil Swedia' pada tahun 2017; 'Dukungan untuk Kerangka Kerja Organisasi Masyarakat Sipil' pada tahun 2017; 'Prinsip Panduan untuk Keterlibatan Sida untuk Bekerja Sama dan Mendukung Organisasi Masyarakat Sipil' tahun 2019; 'Panduan Sida untuk Aplikasi dan Pelaporan dalam Kerja Sama dengan Organisasi Mitra Strategis Swedia dalam Bantuan Organisasi Masyarakat Sipil' pada tahun 2020.'

Pendanaan bagi CSO merupakan instrumen penting kendati tidak dominan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Di negara sejahtera ini, pembagian tanggung jawab antara sektor publik dengan masyarakat sipil cukup jelas. Sektor publik memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan tanggung jawab sebagai penyedia layanan kesejahteraan, sedangkan sektor masyarakat sipil bertugas melakukan penguatan masyarakat sipil, advokasi hak-hak, dan memeriksa

---

<sup>4</sup> Government Communication 2013/14:131, "Aid Policy Framework"

kinerja sektor publik berfungsi.<sup>5</sup>

Itulah mengapa secara umum aktivitas CSO di negara ini lebih banyak bergerak di bidang olah raga, kebudayaan, dan rekreasi.<sup>6</sup> Layanan di bidang kemanusiaan dan pembangunan ada, tetapi lebih banyak dikerjakan oleh CSO berbasis keagamaan sebagai pelengkap aktivitas sektor publik, dan belakangan hari sektor swasta.

Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 sekitar 29% pendapatan CSO berasal dari sektor publik, 62% dari iuran anggota, penjualan, dan lain-lain, dan 9% berasal dari donasi. Hal ini tidak lepas dari partisipasi warga dalam organisasi masyarakat sipil. Di antara total populasi, 43% laki-laki dan 38% perempuan terlibat aktif dalam organisasi. Laki-laki dan perempuan menghabiskan waktu 16 jam per bulan untuk melakukan kegiatan kerelawanan. Jika dihitung, besaran kegiatan kerelawanan setara dengan lebih 400 ribu pekerjaan purna waktu.<sup>7</sup>

Dinamika politik dalam negeri seperti pemerintahan yang berganti dan diikuti perubahan pendekatan, membawa perubahan yang cukup signifikan. CSO mulai ikut terlibat dalam sebagian layanan kesejahteraan yang diberikan sektor publik, terlebih kegiatan yang ada di luar negeri. Perubahan peran ini juga membawa implikasi pada pendanaan publik dan cara CSO bekerja. Selain CSO tradisional yang tetap berorientasi pada penguatan masyarakat sipil dan demokrasi, mulai muncul di era ini CSO yang berorientasi pada kerja konsultasi. Mereka mendapatkan pemasukan dari penugasan yang diberikan pemerintah.

Secara umum, ada tiga mekanisme pendanaan publik bagi CSO, meliputi 1) Berdasarkan kerja sama dengan Sida berbasis program, 2) Dukungan melalui tim tematik dan negara di bawah Sida berbasis program yang mengikuti strategi atau prioritas yang disusun oleh pemerintah dengan pendekatan belanja. Organisasi masyarakat sipil mendapatkan dana dari publik berdasarkan penugasan; dan 3) Dukungan lewat otoritas di bawah Pemerintah Swedia, seperti Akademi Folke Bernadotte dan Badan Nasional untuk Urusan Anak Muda, yang menyediakan hibah yang lebih kecil.<sup>8</sup> Program-program tetap mengacu pada prioritas nasional yang

<sup>5</sup> Center for Frivilligt Socialt Arbejde, n. d., "Civil societies in the Nordic Region – Extracts from the Knowledge Base," hal. 3

<sup>6</sup> David Feltenius and Jessika Wide, 2019, "Business as Usual? Civil Society Organizations in a Marketized Swedish Welfare State," *Journal of Civil Society*, 15:3, hal. 230-248

<sup>7</sup> Government Offices of Sweden, "A policy for civil society," Fact Sheet, November 2010

<sup>8</sup> Pontus Modéer and Henrik Alffram, *op. cit.*, hal. 243-244

dibangun bersama-sama antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil.

Kendati berbeda, dua mekanisme pendanaan di atas memiliki kesamaan dalam hal distribusinya, yaitu penyaluran dana dilakukan lewat organisasi payung yang membawahi CSO. Salah satu pertimbangan adalah untuk mengurangi biaya transaksi dari setiap kerja sama. Di antara sejumlah organisasi payung yang terdaftar, hanya *Forum Syd* –yang menyalurkan dana publik bagi CSO– yang tidak menjadi anggota dari salah satu organisasi payung tersebut. Organisasi payung ini yang akan mengatur pendanaan kepada anggota mereka lewat kerja sama program, melakukan kajian dan tindak lanjutnya atas nama Sida, yang memegang kendali atas sebagian besar dana publik.<sup>9</sup>

Sida adalah bentuk paling mutakhir lembaga negara yang mengelola dana publik. Komite Pusat untuk Bantuan Teknis Swedia untuk Wilayah Belum Berkembang (CK) dibentuk pada 1952. Organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pembangunan di negara-negara berkembang saat itu didominasi oleh organisasi-organisasi keagamaan.<sup>10</sup> CK dibubarkan dan diganti Badan Bantuan Internasional (NIB) pada tahun 1961, persis setelah Undang-undang pertama tentang pembangunan internasional ditetapkan (RUU Pemerintah 1962:100). Selanjutnya, Otoritas Pembangunan Internasional Swedia (SIDA) didirikan melalui reorganisasi NIB pada tahun 1965. Reorganisasi kembali terjadi saat SIDA berubah nama menjadi Sida (Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Swedia) pada 1995.<sup>11</sup> Kemitraan menjadi semakin meluas setelah CSO sekular bertumbuh dan menjadi bagian dari kerangka kerja sama pembangunan ini.

Era ini juga ditandai semakin agresifnya peran Sida dalam kerja sama pembangunan internasional. Laporan OECD menunjukkan Swedia menjadi salah satu di antara sedikit negara yang memberikan bantuan 1% dari pendapatan nasional. Era ini juga ditandai munculnya entitas organisasi lain yang berorientasi pada laba yang mengambil sebagian pekerjaan layanan yang diberikan pemerintah di negara-negara berkembang. Keterlibatan organisasi berorientasi pada laba ini juga memengaruhi dinamika internal. Dalam banyak seri dialog antara pemerintah dengan CSO, baik lokal maupun

<sup>9</sup> Brian Pratt, et al., 2006, "Official Agency Funding of NGOs in Seven Countries: Mechanisms, Trends and Implications," INTRAC, Occasional Papers Series No: 46, August 2006

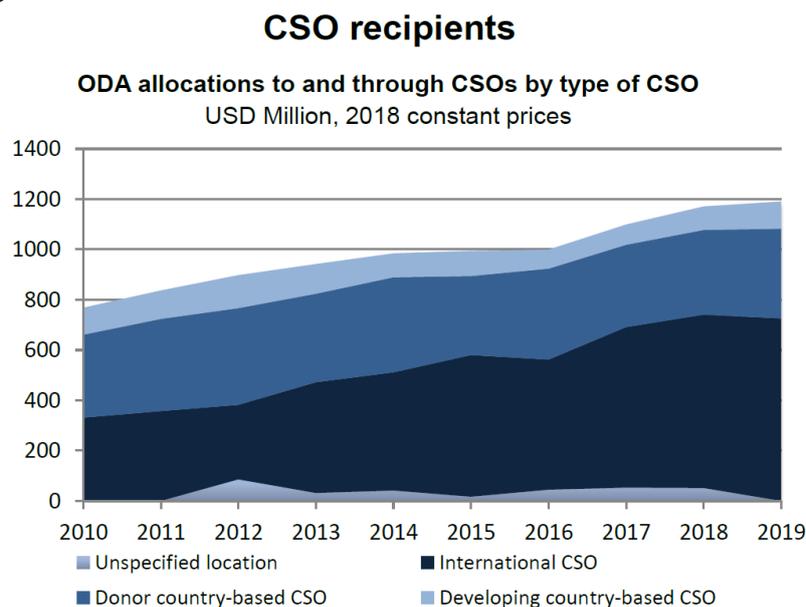
<sup>10</sup> Annika Billing, 2011, "Support to Civil Society within Swedish Development Cooperation," School of Global Studies, University of Gothenburg, Perspectives No. 20

<sup>11</sup> Annika Billing, *op. cit.*

nasional, ada kenaikan jumlah keterlibatan organisasi ini di dalamnya.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019, CSO menerima 1,2 miliar dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 5% dari ODA bilateral bruto dialokasikan kepada CSO sebagai kontribusi inti (*core contribution*) dan 26,3% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (*earmarked contribution*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti yang dialokasikan untuk CSO meningkat sebagai bagian dari ODA bilateral, dari 29,6% menjadi 31,8%.<sup>13</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Swedia kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.



Tabel 1. Alokasi pendanaan Swedia kepada CSO<sup>14</sup>

## 2.2. Pendanaan CSO di Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan negara dengan tingkat kebebasan sipil yang cukup tinggi. Dalam hal kebebasan sipil, secara umum organisasi masyarakat sipil bebas dibentuk oleh siapa saja yang tinggal di negara tersebut. Baik warga negara Amerika Serikat maupun warga negara asing yang tinggal di Amerika Serikat diperbolehkan membentuk CSO tanpa intervensi pemerintah.

<sup>12</sup> Erik Lundberg, 2020, "Toward a New Social Contract? The Participation of Civil Society in Swedish Welfare Policymaking, 1958–2012," *Voluntas*, 31:1371–1384, <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9919-0> (diakses pada 27 Januari 2022)

<sup>13</sup> <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/8a6be3b3-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en> (diakses pada 6 Februari 2022)

<sup>14</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

Indikator minimnya intervensi pemerintah ditunjukkan tidak adanya aturan pendaftaran CSO di level federal. Terdapat aturan pendaftaran organisasi di beberapa negara bagian, namun setiap aturannya berbeda-beda dan cenderung mudah.<sup>15</sup>

Dalam segi pendanaan, CSO Amerika Serikat diperbolehkan menerima pendanaan dari sumber dana dari entitas atau pemerintah negara lain. Pembatasan akan diterapkan apabila CSO terkait menerima pendanaan dari organisasi terlarang, seperti terorisme atau politikus dari negara lain.<sup>16</sup>

Amerika Serikat tidak mengatur pendaftaran CSO atau aturan pendanaan CSO secara spesifik. Namun, Amerika Serikat memiliki peraturan perundang-undangan bernama *The Foreigns Agents Registration Act*. Salah satu substansi undang-undang ini adalah aturan bagi orang yang tinggal di Amerika Serikat yang terafiliasi dengan organisasi asing dan terlibat dalam kegiatan tertentu. Kewajiban bagi mereka yang bekerja dengan organisasi asing adalah untuk membuat pengungkapan publik secara berkala tentang hubungan mereka dengan organisasi asing tersebut, serta pengungkapan kegiatan, pendanaan baik pemasukan dan pengeluaran untuk mendukung kegiatan mereka.<sup>17</sup>

Amerika Serikat cukup ketat dengan aturan pendanaan dari entitas atau individu dari luar negeri. Hal ini ditunjukkan adanya *Executive Order 13224* (setara dengan Keputusan Presiden), yang mempertegas larangan bagi organisasi di Amerika Serikat terkait sumber pendanaan asing dari individu atau organisasi yang masuk dalam daftar organisasi atau individu terlarang.<sup>18</sup>

Amerika Serikat memiliki badan pemerintahan yang bertugas dalam pendanaan, baik untuk dalam negeri maupun bantuan yang disalurkan kepada masyarakat internasional. *United States Agency for International Development (USAID)* menyalurkan bantuan pendanaan dan kegiatan pengembangan pada banyak sektor, antara lain pendidikan dan kemanusiaan.

---

<sup>15</sup> The US Department of State, 2021, "Non Governmental Organizations (NGOs) in the United States", <https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/> (diakses 3 September 2021).

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> 22 U.S.C.A. § 612 (West).

<sup>18</sup> Executive Order 13224, "Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism, 66 FR 49079.

USAID dibentuk berdasarkan amanah *The Foreign Assistance Act of 1961*. Undang-undang ini menggabungkan program dan badan pemerintah terkait pengelolaan bantuan kepada masyarakat internasional. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, program pendanaan dan bantuan tersebar di beberapa lembaga pemerintah. Program bantuan asing yang dikelola bertujuan untuk memperkuat demokrasi, toleransi, dan pengembangan kebebasan sipil.<sup>19</sup>

Pengelolaan pendanaan di USAID terbagi menjadi beberapa bentuk, mengingat bantuan pendanaan USAID tidak hanya untuk kelompok masyarakat sipil di dalam negeri Amerika Serikat, tetapi juga di luar Amerika Serikat. Bentuk mekanisme tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *Host Country Managed Mechanisms*, *USAID Managed Mechanisms*, dan *Third Party Managed Mechanisms*.<sup>20</sup>

Beberapa contoh dari masing-masing mekanisme, antara lain *Host Country Grant (Host Country Managed Mechanism)*, di dalamnya dokumen dan perangkat bantuan keuangan diproses oleh negara penyelenggara dengan sedikit pengembangan dari USAID. Contoh *USAID Managed Mechanism* adalah *Endowment Fund* yang dikelola dari sumber dana, baik dalam mata uang dolar maupun mata uang negara penyelenggara. Pengumpulan sumber dana ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan organisasi yang bekerja sama dengan USAID dalam pelaksanaan program-programnya. *Third Party Managed Mechanism*, salah satu contohnya adalah *Multi-Donor Trust Funds Administered by Public International Organizations*. Dalam skema ini, pendanaan biasanya digunakan untuk bantuan kepada negara-negara yang mengalami krisis. USAID bertugas mengumpulkan dana, sementara kegiatan spesifik diimplementasikan pihak ketiga yang merupakan organisasi publik internasional.

Selain USAID, Amerika Serikat juga memiliki National Endowment Democracy (NED). NED adalah sebuah yayasan nirlaba dan independen yang bekerja untuk membantu perkembangan dan penguatan demokrasi di negara-negara di dunia.<sup>21</sup> Didirikan sejak tahun 1983, NED memberikan sekitar 2.000 pendanaan kepada lebih dari 100 negara di dunia.<sup>22</sup> Pada tahun 2020,

<sup>19</sup> Pasal 499D 22 U.S.C.A. § 2296d (West).

<sup>20</sup> USAID, 2008, USAID Implementing Mechanism, USAID, 2-6.

<sup>21</sup> National Endowment for Democracy, 2021, About the National Endowment Democracy, <https://www.ned.org/about/> (diakses 27 September 2021).

<sup>22</sup> National Endowment for Democracy, 2021, Regions <https://www.ned.org/regions/> (diakses 27 September 2021).

NED memberikan pendanaan kepada 1995 proyek dengan total nilai sebesar USD 254 juta.<sup>23</sup>

NED mengelola pendanaan dengan beberapa pendekatan dan program, antara lain bekerja sama dengan organisasi lain yang bergerak di bidang demokrasi untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang demokrasi. Kerjasama ini memungkinkan terbukanya peluang membagikan strategi kerja untuk mempromosikan demokrasi di negara-negara yang cenderung otoriter.

Pendekatan lain yang dilakukan oleh NED adalah melakukan pendekatan multisektoral. Hal ini pernah dilakukan NED di Indonesia pada periode 1990-an. Pada kurun waktu tersebut, NED bekerja sama dengan beberapa institusi, yaitu National Democratic Institutes for International Affairs (NDI), The International Republican Institute (IRI), The American Center for International Labor Solidarity (ACILS), dan The Center for International Private Enterprise. Keempat organisasi ini memiliki sektor kerja yang berbeda-beda (politik, ekonomi, dan ketenagakerjaan). Program dan dukungan penguatan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan advokasi mengenai hak asasi manusia, pelatihan tentang transparansi dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan pengembangan organisasi untuk melakukan pengawasan pemilu.<sup>24</sup>

Pada 2019, CSO menerima 6,7 miliar dolar AS dari ODA bilateral bruto. Hampir tidak ada ODA bilateral bruto (0,02%) yang dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 22,5% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan proyek yang diprakarsai donor (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti dan yang dialokasikan untuk CSO meningkat sebagai bagian dari ODA bilateral, dari 22,3% menjadi 22,5%.<sup>25</sup>

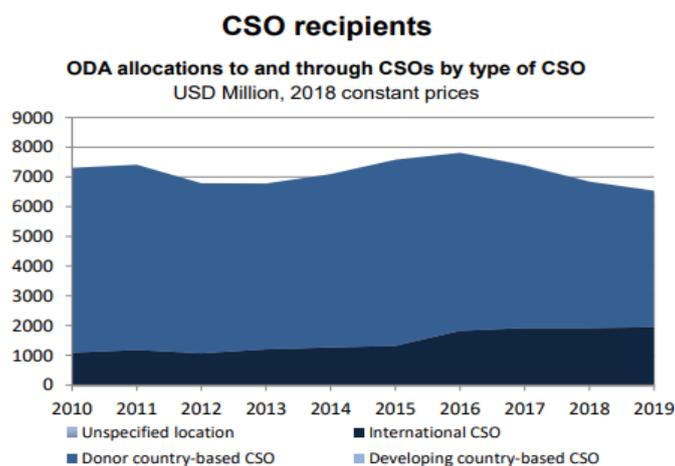
Berikut adalah alokasi pendanaan negara Amerika Serikat kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.

---

<sup>23</sup> National Endowment for Democracy, 2020, NED's Grantmaking in 2020 is the Highest in 36-year History, <https://www.ned.org/ned-democracy-support-continues-october-2020/> (diakses 27 September 2021).

<sup>24</sup> National Endowment for Democracy, 2020, Case Study: Variety of Actors, Program Support Change in Indonesia <https://www.ned.org/about/how-we-work/case-study-variety-of-actors-programs-supports-change-in-indonesia/> (diakses 25 September 2021).

<sup>25</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/45472e20-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oeecd&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/45472e20-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oeecd&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)



Tabel 2. Alokasi pendanaan Amerika Serikat kepada CSO<sup>26</sup>

### 2.3. Pendanaan CSO di Inggris

Secara umum, regulasi negara atas CSO cukup longgar. Keberadaan CSO di Inggris diatur oleh *Charities Act 2011* dan pendaftaran keberadaannya lewat *Charity Commission*. Sama seperti kecenderungan di negara-negara Eropa lainnya, CSO di negara ini mendapat ruang terbuka untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan menjalankan rencana aksi jangka panjang bersama pemerintah. Rencana aksi jangka panjang ini dituangkan dalam perjanjian dengan pemerintah.

Di Inggris, perjanjian kerja sama antara CSO dengan pemerintah disebut *The Compact*. Perjanjian ini mencakup tujuh isu, meliputi<sup>27</sup> 1) Tujuan pendanaan/yayasan, 2) Sumber pendanaan, 3) Bentuk dan pengelolaan legal, 4) Manajemen dan isu operasional lainnya, 5) Kriteria pendanaan bagi CSO, 6) Prosedur pendanaan dan 7) Pelaporan dan evaluasi.

*The Compact* disusun untuk menggalang kolaborasi antara CSO dengan pemerintah Inggris. Beberapa capaian yang ditargetkan adalah masyarakat sipil yang kuat, beragam, dan mandiri; Perancangan dan pengembangan kebijakan, program dan pelayanan publik yang efektif dan transparan; Program dan layanan yang responsif dan berkualitas tinggi; Pengaturan yang jelas untuk mengelola perubahan program dan

<sup>26</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

<sup>27</sup> Sugeng Bahagijo, Bagus Takwin, Hamong Santono dan AH Maftuchan, 2014, Laporan Kajian Trust Fund/Dana Perwalian dan Pendanaan CSO untuk Demokrasi di Indonesia, Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, hal. 49.

layanan dan masyarakat yang setara dan adil.<sup>28</sup> *The Compact* tidak disusun berdasarkan undang-undang. tetapi Sistem hukum di Inggris, kontrol eksekutif dari *The House of Common* (Dewan Perwakilan Rakyat Inggris) atas legislasi, membuat semua produk legislasi memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>29</sup>

*The Compact* dikelola oleh satu badan khusus bernama *Commision for the Compact*. Namun, badan ini hanya bertahan sampai tahun 2011. Setelah itu, tugas pengelolaan dan pengawasan dilakukan dua instansi pemerintah, yaitu *The Office for Civil Society* (bagian dari *Departement for Digital, Culture, Media, and Sport* sejak Juli 2016) dan *Compact Voice*.<sup>30</sup> Pada setiap poin tujuannya, memastikan ada peran yang diambil, baik oleh pemerintah maupun oleh CSO.

Sebagai contoh, pada tujuan “Perancangan dan pengembangan kebijakan, program dan pelayanan publik yang efektif dan transparan”, pemerintah berkewajiban melakukan tindakan-tindakan, salah satu contohnya memastikan bahwa CSO memiliki peran yang lebih besar dan lebih banyak peluang dalam memberikan layanan publik dengan membuka pasar baru sesuai dengan langkah-langkah reformasi layanan publik yang lebih luas, dan mereformasi lingkungan *komisioning* di pasar yang ada. Sementara, salah satu kewajiban CSO adalah memastikan pengaturan tata kelola yang kuat di internal organisasi mereka, sehingga organisasi dapat mengelola risiko apapun yang terkait dengan pemberian layanan dan model pembiayaan dengan sebaik-baiknya, termasuk melakukan pemberitahuan dini ketika ada perubahan terkait situasi internal untuk proses adaptasi.

*The Compact* diterapkan sampai pada level pemerintahan daerah, sehingga setiap otoritas pemerintah daerah (disebut *The Council*), diharapkan memiliki jenis perjanjian *The Compact* dengan CSO yang beroperasi di areanya, atau merujuk pada prinsip-prinsip perjanjian

---

<sup>28</sup> The UK Government, 2010, *The Compact: The Coalition Government and civil society organisations working effectively in partnership for the benefit of communities and citizens in England*, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/61169/The\\_20Compact.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61169/The_20Compact.pdf) (diakses 2 September 2021).

<sup>29</sup> William Plowden, 2003, *The Compact: Attempts to Regulate Relationships between Government and the Voluntary Sector in England*, *Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 32 No. 3, 420.

<sup>30</sup> Kirsty Weakly, 2017, *Kirsty Weakly: What is the Compact and Does it Still Matter?* <https://www.civilsociety.co.uk/voices/kirsty-weakly-what-is-the-compact.html> (diakses 23 September 2021).

*The Compact National.*<sup>31</sup>

Selain *The Compact*, UK Aid Strategy menjadi panduan dalam pengelolaan dana, baik untuk CSO di dalam negeri dan luar negeri. Ada mekanisme tersendiri dalam penyusunan strategi terkait keberadaan CSO, yaitu Civil Society Partnership Review (CSPR). FCDO menggunakan hasil *review* ini untuk kemitraan selanjutnya dalam dokumen UK Aid Strategy.

UK Aid Direct adalah mekanisme pendanaan terpusat dari FCDO untuk CSO ukuran kecil dan sedang. Aid Direct yang diperkenalkan kembali pada 2014 secara spesifik mendukung CSO kecil dan sedang baik yang berada di Inggris maupun di luar negeri. Sebelumnya, UK Aid Direct bernama Global Poverty Action Fund (GPAF). Ada tiga jenis hibah, meliputi 1) Small Charities Challenge Fund (SCCF) diberikan kepada organisasi karitatif dan nirlaba yang terdaftar di Inggris; 2) Hibah Community Partnership ditujukan kepada CSO, baik yang terdaftar di Inggris maupun di luar negeri sesuai prioritas Inggris dan memiliki pendapatan 1 juta Pound per tahun; 3) Hibah Impact ditujukan kepada CSO seperti Community Partnership. Berbeda dibandingkan Community Partnership, hibah ini bisa dikerjakan di satu atau lebih negara. Proses pengajuan SCCF lebih sederhana.<sup>32</sup>

Selain mekanisme UK Aid Direct, FCDO juga memberikan hibah untuk CSO lewat UK Aid Match yang berasal dari donasi masyarakat yang tinggal di Inggris dan dari pemerintah. Setiap 1 Pound donasi masyarakat akan ditambah 1 Pound lagi oleh pemerintah. Sejak 2018 UK Aid Match dikelola oleh seorang Fund Manager dan bekerja sama dalam bentuk konsorsium dan salah satunya adalah Oxford Policy Management.

Mekanisme lainnya adalah UK Aid Connect yang disalurkan lewat konsorsium. CSO di sini merupakan salah satu organisasi yang layak mendapatkan dana dari FCDO selain sektor swasta dan pemerintah lokal.

Pada tahun 2019, CSO menerima 2,0 miliar dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 3% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 11,5% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan proyek yang diprakarsai oleh donor (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti yang dialokasikan untuk CSO menurun sebagai bagian

---

<sup>31</sup> Local Government & Social Care Ombudsman UK, 2020, *Compacts Between Councils and Civil Society Organizations* <https://www.lgo.org.uk/make-a-complaint/fact-sheets/other-topics/compacts-between-councils-and-civil-society-organisations> (diakses 27 September 2021).

<sup>32</sup> <https://www.ukaidirect.org/apply/> diakses pada 28 Januari 2022

dari ODA bilateral, dari 16% menjadi 15%.<sup>32</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Inggris kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.<sup>33</sup>



Tabel 3. Alokasi pendanaan Inggris kepada CSO <sup>34</sup>

## 2.4. Pendanaan CSO di Korea Selatan

Tren kebebasan sipil di Korea Selatan banyak mengalami perkembangan, khususnya sejak transisi demokrasi pada tahun 1987. Namun, pada awal 1990-an, pemerintah Korea Selatan sempat melakukan pembatasan terhadap jejaring organisasi dengan Korea Utara, dikarenakan terjadinya wabah kelaparan di Korea Utara.<sup>35</sup>

Situasi ini sempat berlanjut, sampai tahun 1998 Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung mengesahkan *Sunshine Policy* atau dikenal dengan nama resmi “Comprehensive Engagement Policy towards North Korea.”<sup>36</sup>

<sup>32</sup> <https://www.ukaidirect.org/apply/> diakses pada 28 Januari 2022

<sup>33</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ff4da321-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ff4da321-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)

<sup>34</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

<sup>35</sup> Lenka Kudlacova, 2014, South Korean Civil Society Organizations as Confidence-Builders? The Experience with South Korean Civil Society Groupings in the Republic of Korea and the DPRK, Perspectives Vol. 22 No. 2, hal. 39

<sup>36</sup> Jesse Min, 2017, The Sunshine Policy of South Korea, <http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/min2/> (diakses 2 September 2021).

Kebijakan ini melonggarkan pembatasan hubungan diplomatik dari Korea Selatan kepada Korea Utara yang berdampak pada organisasi-organisasi, khususnya yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk melaksanakan aktivitasnya.

Setelah tahun 1998, dengan pergantian kepala pemerintahan, aktivitas CSO di Korea Selatan mengalami perubahan yang fluktuatif. Hingga hari ini komitmen dukungan terhadap aktivitas CSO di Korea Selatan tidak bisa dilepaskan dari situasi rekonsiliasi di Korea karena berkaitan dengan kepercayaan yang dibangun oleh banyak entitas dan instansi pemerintahan terkait.<sup>37</sup>

Dalam hal pendanaan, sebagaimana sebagian besar negara di Asia, Korea Selatan mengandalkan prinsip kedermawanan yang diwujudkan dalam beberapa bentuk kebijakan. Selain itu, dalam masa pemerintahan Presiden Kim Dae-Jung, disahkan pula *Law to Promote Non-Profit Civil Organizations* pada tahun 1999. Undang-undang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membantu perkembangan CSO di Korea Selatan. Beberapa substansi penting Undang-undang ini, antara lain Kementerian Dalam Negeri direkomendasikan untuk membantu aktivitas CSO yang terkait dengan program-program untuk publik, khususnya bantuan pendanaan. Selain itu, Undang-undang ini memberikan pembebasan pajak bagi CSO.<sup>28</sup>

Korea Selatan juga telah memiliki program dana bantuan atau *Official Development Assistance* (ODA). Melalui skema ODA, banyak kerja sama internasional yang berhasil dicapai pemerintah Korea Selatan. Hal ini karena tanggung jawab utama ODA ada di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan. Sementara, proses pinjaman lunak (*concessional lending*) diproses oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Korea Eximbank.<sup>39</sup>

Data terakhir pada tahun 2019 menunjukkan bahwa CSO di Korea Selatan menerima pendapatan kotor sebesar USD 45.2 juta dari hasil kerja sama skema ODA tersebut. Pendapatan ini meningkat dari tahun 2018 sebesar USD 39,62 juta.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Lihat Lenka Kudlacova, op. cit., hal. 40

<sup>38</sup> Inchoon Kim dan Changsoon Hwang, 2002, *Defining the Nonprofit Sector: South Korea*, John Hopkins University Institute for Policy Studies, 8-9

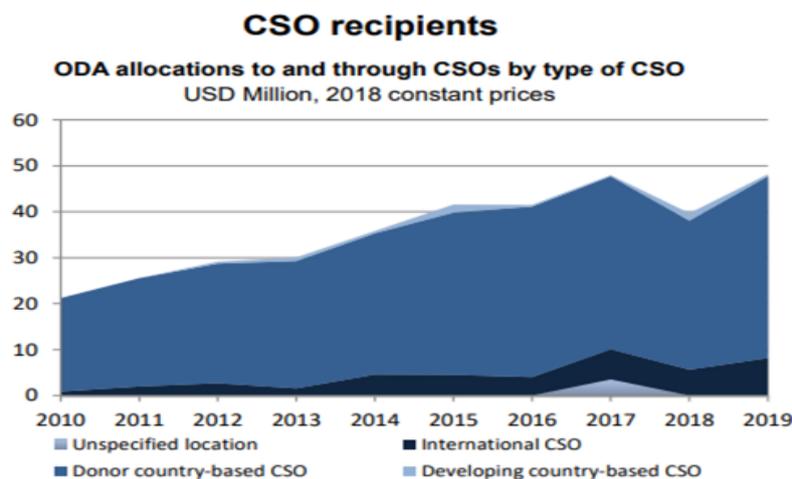
<sup>39</sup> OECD, 2020, *Development Co-Operation Profiles: Korea*, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d919ff1a-en/index.html?itemId=/content/component/d919ff1a-en> (diakses 11 September 2021)

<sup>40</sup> Ibid.

Terdapat dua jenis pendanaan bantuan pengembangan pada CSO melalui program ODA. Pertama, Aid to CSOs yang berkontribusi utama kepada program dari CSO dan dikelola oleh CSO. Kedua, Aid Chanelled through CSOs bantuan dana yang disalurkan kepada CSO atau organisasi swasta lainnya untuk mengimplementasikan proyek yang bisa menciptakan inisiatif donor/dana (earmarked funding).<sup>41</sup>

Pada tahun 2019, CSO menerima 45,2 juta dolar AS dari ODA bilateral bruto. Hampir 0% dari ODA bilateral bruto dialokasikan CSO sebagai kontribusi inti (core) dan 2,1% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan proyek yang diprakarsai donor (earmarked). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti yang dialokasikan untuk CSO sebagai bagian dari ODA bilateral tetap stabil, berkembang dari 2,1% menjadi 2,2%.<sup>42</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara oleh Korea Selatan kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.



Tabel 4. Alokasi pendanaan Korea Selatan kepada CSO<sup>43</sup>

## 2.5. Pendanaan CSO di Belanda

Keterlibatan warga Belanda dalam aktivitas kerelawanan cukup tinggi dari waktu ke waktu. Pada tahun 1995, sebesar 38% dari populasi orang dewasa terlibat dalam aktivitas ini. Pada tahun 2003, disebut ada 15% dari total tenaga kerja di Belanda bekerja di sektor nirlaba. Kedua hal di atas

<sup>41</sup> The Development Assistant Committee, 2019, Aid for Civil Society Organizations, OECD, hal. 2

<sup>42</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d919ff1a-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oced&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d919ff1a-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oced&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)

<sup>43</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

menjadikan Belanda berada di peringkat atas di antara negara-negara Eropa di bidang kepentingan publik dan partisipasi politik. Keterlibatan aktif warga dalam kegiatan CSO sejalan dengan tingginya dukungan masyarakat.<sup>44</sup>

Pintu pendanaan bagi CSO dari sektor publik hampir di seluruh bidang keagamaan dan nirlaba di Belanda tercatat mulai terbuka pada tahun 1917 saat partai-partai yang berkompetisi di Belanda berebut pengaruh dan suara dengan melakukan kompromi terhadap tuntutan kelompok kepentingan, yaitu Gereja Katolik dan Protestan,<sup>45</sup> untuk pembiayaan sekolah berbasis agama sepenuhnya seperti sekolah negeri.<sup>46</sup> Kompetisi ini memperlihatkan kondisi semestinya relasi antara negara dengan masyarakat sipil dikelola, dan proses demokrasi perlu terus dijaga. Sesuai prinsip subsidiaritas, di bidang pendidikan dasar, negara hadir terbatas dalam pendanaan, sedangkan urusan pendidikan dan internal sekolah ada di pihak masyarakat sipil yang memang sudah memiliki kemampuan dalam mengelolanya.

Dalam perkembangan selanjutnya, negara menjadi semakin murah hati dan perannya dalam penguatan CSO menjadi semakin kental tidak lagi sekedar bidang pendidikan dasar seperti pada era awal. Negara mengucurkan dana setiap tahun bagi CSO untuk membayar staf yang digaji, baik yang bertugas memberikan layanan maupun yang bekerja di kantor pusat organisasi mereka.<sup>47</sup> Pada tahun 1995 pendapatan bersumber dari dana publik mencapai 59% dari total pendapatan sektor masyarakat sipil. Di Belanda, peran CSO yang didanai oleh sektor publik melampaui pemberian layanan sosial dasar semata. Aktivitas mereka di kebudayaan, advokasi, solidaritas internasional, lingkungan, kerelawanan telah memberikan sumbangan pada kehidupan sosial yang lebih bermakna.<sup>48</sup>

Mekanisme pendanaan yang menggantungkan diri pada sektor publik juga tercermin pada saat CSO terlibat dalam kerja sama pembangunan Belanda dengan luar negeri. Belanda adalah salah satu

---

<sup>44</sup> Patryk Czulno, n.d., "Civil Society in the Netherlands and Poland: Learning from the Dutch?" hal. 231-232

<sup>45</sup> Vic Veldheer and Ary Burger, 1999, "The Netherlands: Key Features of the Dutch Nonprofit Sector," dalam Lester M. Salamon, *et al.* (eds), *Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector*, Baltimore, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, hal. 145-146

<sup>46</sup> Rik Habraken, *et al.*, 2013, "Dutch Civil Society at Crossroads," *Development in Practice*, DOI: 10.1080/09614524.2013.801398, hal. 745

<sup>47</sup> Rik Habraken, *et al.*, *op. cit.*, 745

<sup>48</sup> Ary, Burger, *et al.*, 1997, "Defining the Nonprofit Sector: The Netherlands" dalam Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier (eds), *Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project*, no. 23, Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies

negara terkemuka yang memberikan hibah kepada negara-negara berkembang. Bantuan Pembangunan Belanda (NEDA) mengimplementasikan Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Pemerintah Belanda di bawah Kementerian Luar Negerinya.

Selain kebijakan publik yang mengatur cara CSO bekerja, seperti di negara-negara Eropa lain, tidak ada cukup banyak ketentuan negara yang mengatur keberadaan CSO. Pasal 8 dalam Konstitusi Belanda menyebutkan kebebasan berorganisasi diakui, tetapi tetap menjadi subjek dari larangan UU yang dikeluarkan parlemen berkaitan dengan ketertiban umum. Ringkasnya, pengaturan tetap ada, tetapi lebih terkait dengan pajak. Di tingkat praktis, CSO menikmati kebebasan yang tinggi. CSO harus didaftarkan sebagai yayasan atau perkumpulan, dua bentuk legal yang biasanya digunakan dalam pembentukan CSO.

Namun, ada beberapa pembatasan yang dibuat pemerintah kota yang melarang penggalangan dana dari pintu ke pintu atau di tempat terbuka tanpa izin. Hal yang sama juga tidak ada peraturan yang membatasi secara spesifik pendanaan dari luar negeri. Sebaliknya, penggalangan dana diatur secara sendiri oleh Regulator Penggalangan Dana (CBF) sebagai mekanisme yang dibuat sendiri oleh masyarakat sipil. Pada tahun 2017, CBF menerbitkan regulasi secara lebih detail yang mengatur tata cara CSO dapat dianggap sebagai organisasi karitatif untuk tujuan penggalangan dana.<sup>49</sup>

Pada era transparansi, pemerintah Belanda, lewat Kementerian Perlindungan Hukum, untuk pertama kali mengatur pendanaan, baik dari dalam maupun luar negeri. RUU ini memaksa CSO untuk memublikasikan donasi sebesar 15 ribu Euro per tahun yang merinci nama dan tempat pemberi donasi. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat menjadi subjek tindak kriminal menurut Undang-undang Tindak Pelanggaran Ekonomi yang dapat berujung pada denda, pelayanan komunitas, atau bahkan bui.<sup>50</sup>

Pada tahun 2019, CSO menerima 940,7 juta dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 2% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 24,9% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan proyek yang diprakarsai donor (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti dan yang dialokasikan untuk CSO meningkat sebagai bagian

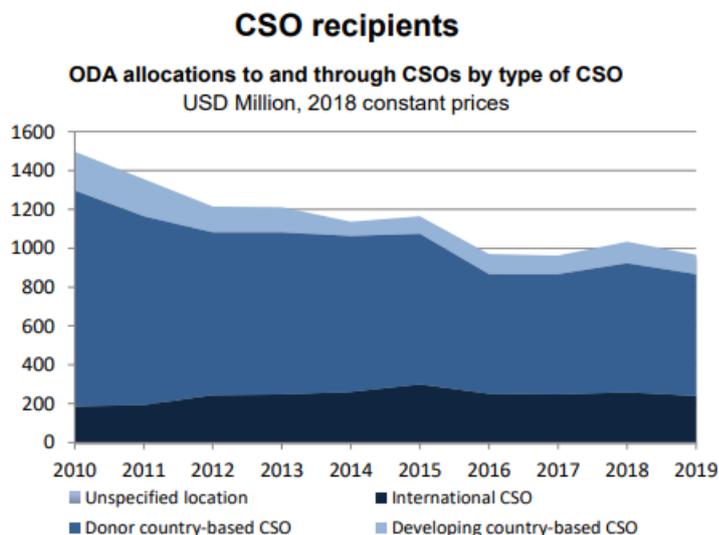
---

<sup>49</sup> CIVICUS and the Irish Council for Civil Liberties, 2018, "Regulating Political Activity of Civil Society," hal. 8-10

<sup>50</sup> <https://ecnl.org/news/according-new-dutch-draft-act-csos-would-be-obliged-publish-personal-information-certain> (diakses pada 6 Februari 2022)

dari ODA bilateral, dari 26,9% menjadi 27,3%.<sup>51</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Belanda kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.



Tabel 5. Alokasi pendanaan Belanda kepada CSO<sup>52</sup>

## 2.6. Pendanaan CSO di Jerman

Mirip seperti Belanda, prinsip subsidiaritas menjadi salah satu faktor latar belakang kehadiran CSO dan keterlibatan negara sebagai rentetannya dalam pembiayaan organisasi ini. Kendati awalnya berasal dari ajaran Gereja Katolik, subsidiaritas selanjutnya menjadi identik dengan setiap alternatif kelembagaan apapun bagi negara yang menyediakan layanan sosial dasar bagi warga.<sup>53</sup>

Pada kurun waktu antara tahun 1950 dan 1975, Kode Sosial, Undang-undang Bantuan Sosial Federal, dan Undang-undang Kesejahteraan Pemuda ditetapkan. Prinsip subsidiaritas yang menekankan pentingnya keberadaan CSO dalam berperan di bidang pelayanan sosial dasar dan kesejahteraan diperkenalkan. Dalam hal ini negara wajib melindungi dan

<sup>51</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2faea623-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2faea623-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)

<sup>52</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

<sup>53</sup> Helmut K. Anheier and Wolfgang Seibel, 1993, "Defining the Nonprofit Sector: Germany," Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 6. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, hal. 6

mendukungnya.<sup>54</sup> Undang-undang Bantuan Sosial Federal misalnya, menyatakan dalam pasal 93 bahwa lembaga pemerintah dilarang mendirikan penyedia layanan mereka sendiri jika asosiasi yang sesuai tersedia, atau dapat diperpanjang atau disediakan.<sup>55</sup>

Di tengah keberatan beberapa pihak terkait dengan prinsip ini, pada tahun 1968, Mahkamah Agung Federal menyatakan layanan dan bantuan sosial kepada semua warga negara, baik secara finansial maupun organisasional. Keputusan ini hanya mempertegas kedudukan CSO di hadapan negara. Berikut salah satu ilustrasi yang memperlihatkan betapa kokoh keberadaan CSO: CARITAS, suatu CSO besar yang berbasis pada Gereja Katolik, mempekerjakan lebih banyak orang daripada konglomerat industri Siemens, salah satu pemberi kerja terbesar di Republik Federal Jerman. Jika digabung secara keseluruhan, CSO yang memberikan layanan kesejahteraan gratis mempekerjakan tiga kali lebih banyak orang daripada Kantor Pos Federal.<sup>56</sup>

Secara historis, kerja sama pemerintah-masyarakat sipil yang erat dalam pemerintahan tingkat lokal dan nasional juga telah menjadi ciri yang menonjol di Jerman sejak abad ke-19. Hal ini termasuk kerja sama dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Saat ini, masyarakat sipil sangat terlibat dalam penyediaan layanan sosial, akibatnya sangat bergantung kepada negara dalam pendanaan.<sup>57</sup>

Dalam kerangka ini, negara dan masyarakat sipil hadir untuk saling melengkapi. Pendanaan CSO yang terafiliasi dengan gereja relatif stabil karena mendapatkan sokongan dari pajak umat yang ditarik oleh negara. Sementara, CSO yang lain sangat tergantung pada sektor publik. Prinsip ini memperlihatkan sifat ketergantungan dan saling mengisi antara sektor publik dengan masyarakat sipil. Ketergantungan besar pada dana dari sektor publik tidak serta merta memengaruhi independensi organisasi CSO. Prinsip lain, yaitu mengatur diri sendiri yang mengakar kuat dalam setiap organisasi sejak sebelum munculnya demokrasi modern di negara ini menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskannya.

---

<sup>54</sup> Helmut K. Anheier and Wolfgang Seibel, *op. cit.*, hal. 17

<sup>55</sup> Balazs Sator, 2010, "International Practices on Funding Civil Society Organisations," OSCE Project Coordinator in Ukraine, hal. 76

<sup>56</sup> Helmut K. Anheier and Wolfgang Seibel, *op. cit.*, hal. 19

<sup>57</sup> CIVICUS and the Irish Council for Civil Liberties, *op. cit.*, hal. 11

Selain sebagai penyedia jasa sosial dan kesejahteraan, CSO memiliki peran dalam kerangka advokasi. Sebagian besar CSO memiliki kaitan erat dengan keyakinan agama atau politik. Sebagai asosiasi kepentingan, mereka berpartisipasi dalam perumusan, pembiayaan, dan pelaksanaan program dan kegiatan publik.<sup>58</sup>

Di segi kebijakan, sebagai akibat dari prinsip subsidiaritas dan prinsip mengatur diri sendiri, CSO cenderung relatif terintegrasi dengan baik ke dalam fungsi pembuatan kebijakan pemerintah. Di banyak legislasi, otoritas publik diharuskan berkonsultasi dengan CSO dalam hal kebijakan ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>59</sup>

Pada 2008 terdapat 550,000 perkumpulan (*Verein*) yang terdaftar dan lebih dari 16.000 yayasan (*Stiftung*) ada di Jerman.<sup>60</sup> Keberadaan perkumpulan dan asosiasi diatur oleh 1) Konsitusi (*Grundgesetz*); 2) Kode Sipil Federal (*Bürgerliches Gesetzbuch*); 3) Hukum Perkumpulan (*Vereinsgesetz*) yang ditetapkan pada tahun 1964; dan 4) Hukum tentang Yayasan di 16 negara bagian Jerman (*Bundesländer*).<sup>61</sup> Sedangkan, amal (*Gemeinnützigkeit*) hanyalah istilah dalam hukum pajak. Tidak ada hukum masyarakat sipil dan tidak ada badan hukum yang terpisah untuk mengatur lembaga amal.<sup>62</sup>

Sebagian besar pemerintah negara bagian memiliki kebijakan dan program pembangunan mereka sendiri dan bertindak sebagai pelaksana program federal. Pemerintah daerah adalah tempat kebijakan diimplementasikan dan dengan demikian mereka adalah fokus lain dari upaya bantuan dan pembangunan. Sistem politik yang terdesentralisasi ini mungkin menjadi alasan jumlah dan keragaman CSO Jerman.<sup>63</sup>

Ada dua jaringan CSO berbasis gereja yang terkait dengan Gereja Protestan dan Katolik yang menerima dana publik yang cukup besar, yaitu jaringan Protestan yang disebut *Evangelischer Entwicklungsdienst* (EED – Pelayanan Pembangunan Protestan) dan kelompok Katolik yang disebut Misereor – *Hilfswerk der Katholischen Kirche* (Misereor – Badan Bantuan Gereja Katolik). Dukungan negara berasal dari pembentukan program dan

---

<sup>58</sup> Helmut K. Anheier and Wolfgang Seibel, *op. cit.*, hal. 20

<sup>59</sup> Helmut K. Anheier and Wolfgang Seibel, *op. cit.*, hal. 27

<sup>60</sup> Balazs Sator, *op. cit.*, hal. 72

<sup>61</sup> <https://www.cof.org/country-notes/nonprofit-law-germany>

<sup>62</sup> CIVICUS and the Irish Council for Civil Liberties, *op. cit.*, hal. 11

<sup>63</sup> Susan Engel, 2017, "Germany's Government-Civil Society Development Cooperation Strategy: The Dangers of the Middle of the Road," *Cosmopolitan Civil Societies: an Interdisciplinary Journal*, Vol. 9, No. 1, hal. 50

pelayanan bantuan Jerman yang dimulai pada tahun 1961 dibawah Kanselir pertama Republik Federal Jerman, Konrad Adenauer, dengan partai politiknya (Uni Demokrat Kristen) yang mengusung nilai-nilai Kristiani. Pemerintah menyangandarkan diri pada Gereja Protestan dan Katolik yang memiliki modal sosial berupa jaringan dengan organisasi lokal dan pengalaman saat melakukan kegiatan misionaris di negara-negara berkembang. Pada periode tahun 2011 hingga 2012 Misereor dan EED mendapatkan sekitar 60% dan hampir 70% pendanaannya dari sektor publik.<sup>64</sup>

Kementerian Federal untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan, *Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung* (BMZ) yang didirikan pada tahun 1961, hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan program secara keseluruhan, konsultasi internasional, dan negosiasi dengan negara-negara berkembang mengenai proyek-proyek tertentu dan program. Tanggung jawab implementasi dan untuk beberapa bidang pengembangan kebijakan jatuh ke berbagai organisasi dan lembaga –pemerintah, swasta, dan non-pemerintah– di tingkat federal, negara bagian dan komunal. Ada dua mekanisme yang diambil BMZ, yaitu pemberian *block grant* khusus untuk Gereja maupun mekanisme pendanaan yang lebih kompetitif.<sup>65</sup>

Pada tahun 2019, CSO menerima 1,7 miliar dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 4% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 3,8% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang mereka prakarsai dan telah mereka ajukan pendanaannya (*earmarked*). Antar tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti yang dialokasikan untuk CSO sedikit meningkat sebagai bagian dari ODA bilateral, dari 7,2% menjadi 7,8%.<sup>66</sup>

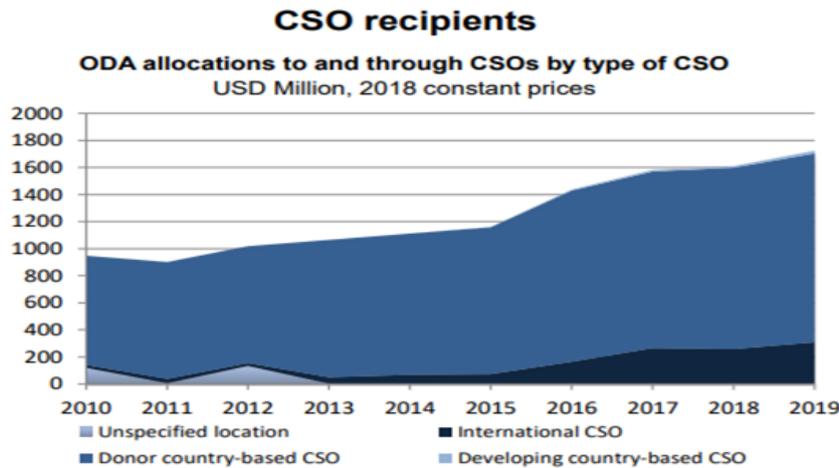
Berikut adalah alokasi pendanaan negara Jerman kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.

---

<sup>64</sup> Susan Engel, *op. cit.*, hal. 48-50

<sup>65</sup> Susan Engel, *op. cit.*, hal. 51

<sup>66</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0079f636-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0079f636-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)



Tabel 6. Alokasi pendanaan Jerman kepada CSO

## 2.7. Pendanaan CSO di Norwegia

Pendanaan dari sektor publik untuk CSO di Norwegia tidak banyak berbeda dibandingkan negara-negara-lain. Dana dari sektor publik menjadi instrumen penting bagi tumbuh dan berkembangnya CSO. Akan tetapi, CSO di negeri ini memiliki karakteristik berbeda. Dibandingkan dengan CSO di negara-negara lain, CSO Norwegia memiliki peran minor dalam penyediaan layanan kesejahteraan. Dalam konteks domestik, mereka lebih fokus bekerja di bidang olah raga, rekreasi, dan kebudayaan. Sementara, dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, CSO menjadi bagian penting dari pelaksana kebijakan dan penyedia layanan kesejahteraan.

Kendati tingkat pengeluaran kesejahteraan publik yang tinggi, sektor masyarakat sipil di Norwegia secara keseluruhan tidak terlalu bergantung pada pendapatan dari sektor publik. Hanya 36% dari pendapatan berasal dari dana publik. Hal ini disebabkan sebagian kecil dari sektor ini melakukan layanan kesejahteraan, yang sebagian besar dibayar oleh negara. Negara lebih siap menangani beberapa tantangan produksi layanan kesejahteraan, seperti pendanaan, menghindari partikularisme dan paternalisme, dan melembagakan standar kontrol kualitas. CSO dapat memersonalisasi layanan, dan menjadi lebih inovatif, fleksibel, dan hemat biaya. Kekuatan masing-masing yang saling mengisi ini membuat kerja sama menjadi pilihan yang masuk akal.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

<sup>68</sup> Jo Saglie and Karl Henrik Sivesind, 2018, "Civil Society Institutions or Semipublic Agencies? State Regulation of Parties and Voluntary Organizations in Norway," *Journal of Civil Society*, 14:4, 292-310, DOI: 10.1080/17448689.2018.1518769, hal. 299-300

Di bidang layanan kesejahteraan, pendapatan dari pemerintah menyumbang lebih dari 60% dari pendanaan. Kegiatan internasional memang menerima sumbangan pribadi dalam jumlah yang signifikan, tetapi pembayaran yang lebih besar datang dari negara untuk bantuan pembangunan dan bantuan bencana. CSO dalam konteks kerja sama pembangunan dan bantuan kemanusiaan luar negeri merupakan instrumen pelaksanaan kebijakan publik utama.<sup>69</sup>

Sekali lagi, kekuatan masyarakat sipil menjadi dasar untuk bekerja sama. CSO dianggap memiliki modal sosial yang kuat, yaitu jaringan dengan masyarakat di negara-negara berkembang, yang dibangun sebagai bagian dari kerja misionaris oleh sebagian CSO yang berbasiskan pada gereja. CSO berbasiskan gereja memiliki pengaruh kuat pada kehidupan dan budaya lokal. Mereka juga pendiri penting lembaga penyedia layanan kesejahteraan, seperti rumah sakit, panti jompo, dan pendidikan.<sup>70</sup>

Model sosial demokrasi memberikan insentif yang lebih sedikit kepada negara untuk mengontrol dan mengatur CSO, meskipun sektor ini sebagian bergantung pada pendanaan negara. Selain itu, karena CSO memainkan peran yang lebih kecil dalam layanan kesejahteraan, mereka tidak terlalu dibebani oleh rasa takut kehilangan dukungan dari negara. Kebebasan ini menghasilkan CSO yang sangat kritis.<sup>71</sup>

Norwegia bahkan telah disebut sebagai “masyarakat sipil yang bersahabat dengan negara,” CSO seringkali mempromosikan peningkatan keterlibatan pemerintah, daripada melihat pemerintah sebagai musuh. Masyarakat sipil kuat, negara juga kuat. Meskipun jarak ideologis bisa sangat jauh, pemerintah menerima organisasi masyarakat sipil sebagai peserta yang sah dalam wacana kebijakan.<sup>72</sup>

Jauh sebelum perluasan layanan kesejahteraan pada 1960-an, CSO berfungsi sama pentingnya dalam melengkapi penyediaan layanan. Dalam pengembangan kesejahteraan di tingkat perkotaan, CSO berfungsi sebagai penyuar kepentingan kelompok rentan, mitra konsultasi, penyedia layanan, serta agen pengawasan pemerintah. Peran sebagai penyedia layanan

<sup>69</sup> Jo Saglie and Karl Henrik Sivesind, *op. cit.*, hal 300

<sup>70</sup> Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, and Lars Svedberg, 2019, “Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context,” dalam Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg (eds.), *Civic Engagement in Scandinavia Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden*. Springer, Nonprofit and Civil Society Studies, An International Multidisciplinary Series, hal. 6

<sup>71</sup> Jo Saglie and Karl Henrik Sivesind, *op. cit.*, hal 296-297

<sup>72</sup> Jo Saglie and Karl Henrik Sivesind, *op. cit.*, hal 297

menjadi lebih mengemuka setelah pemerintah menyadari biaya penyediaan layanan, baik lewat swasta ataupun CSO lebih murah dibanding jika hal yang sama dilakukan negara.<sup>73</sup>

Konstitusi Norwegia tidak banyak bicara tentang organisasi. Revisi konstitusi besar-besaran dilakukan pada tahun 2014. Isu hak asasi manusia diabadikan dalam konstitusi dan pasal tentang kebebasan berserikat diadopsi di Pasal 101: “Setiap orang berhak untuk membentuk, bergabung dan meninggalkan asosiasi, termasuk serikat pekerja dan partai politik.” Menyusul amandemen konstitusi pada tahun 2012, dukungan negara untuk asosiasi keagamaan juga disebutkan secara eksplisit.<sup>74</sup>

Keberadaan CSO diatur sangat longgar di negeri ini. Kendati tidak ada kewajiban untuk mendaftar, ada insentif ekonomi yang jelas bagi CSO untuk dicantumkan dalam Daftar Publik. Selain pengurangan maupun pengecualian pajak, mereka dapat mengakses dana publik. Mereka harus terdaftar untuk dapat berpartisipasi dalam Akar Rumput (*Grasrotandelen*), yang telah menjadi elemen utama dalam pembiayaan CSO lokal. Akar Rumput adalah pengaturan pendanaan yang diperkenalkan pada tahun 2009. Selain terdaftar, dana publik ini hanya dapat diberikan kepada organisasi terlibat dalam kegiatan di tingkat lokal. Mereka yang tidak tercakup dalam pengaturan ini adalah organisasi yang bekerja dalam kategori pendidikan dan penelitian, tempat tinggal dan komunitas lokal atau kesehatan. Lebih dari 28.500 kelompok menerima dana akar rumput pada tahun 2015.<sup>75</sup> Pada 2014, 231 organisasi imigran lokal atau regional menerima dana dari 19 dewan daerah di Norwegia. Banyak yang berpartisipasi untuk membangun dan memelihara jaringan sosial dan untuk menghindari isolasi sosial. Hal ini terutama menyangkut imigran yang baru tiba.

Norad adalah Badan Kerja Sama Pembangunan Norwegia yang didirikan pada 1968. Badan Kerja Sama adalah salah satu direktorat di bawah Kementerian Luar Negeri Norwegia. Pada pertengahan tahun 2004, tanggung jawab untuk bantuan pembangunan resmi antar-negara telah dialihkan ke Kementerian Luar Negeri Norwegia, sementara Norad terus

---

<sup>73</sup>Jill Loga, 2018, “Civil Society and the Welfare State in Norway – Historical Relations and Future Roles,” Oxford University Press and Community Development Journal, hal. 577

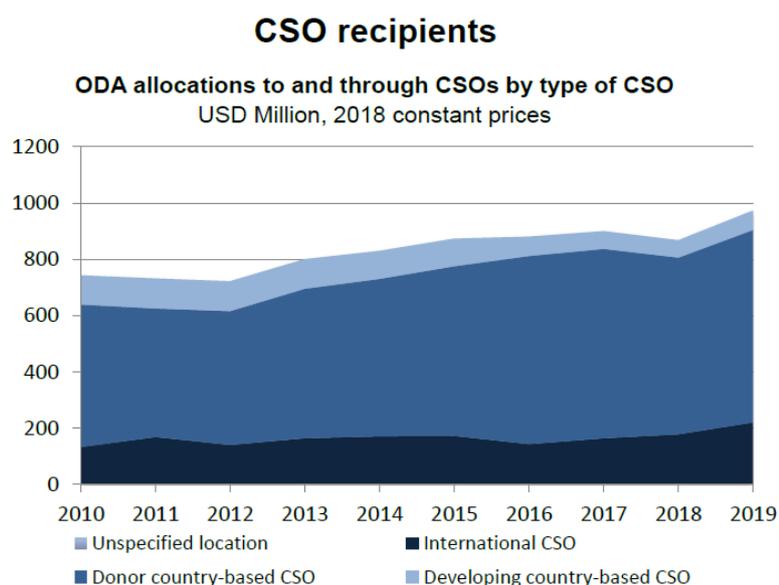
<sup>74</sup>Jo Saglie and Karl Henrik Sivesind, *op. cit.*, hal. 297

<sup>75</sup>Per Selle, Kristin Strømsnes, and Jill Loga, 2018, “State and Civil Society: A Regime Change?” dalam Bernard Enjolras and Kristin Strømsnes (eds.), **Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway**, hal. 125

mendanai kegiatan LSM di negara berkembang. Terkait dengan Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Norwegia, Norad melapor kepada Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia. Fungsi Norad diatur dalam kerangka acuan badan dan surat alokasi tahunan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Iklim dan Lingkungan.

Pada tahun 2019, CSO menerima 894 juta dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 7% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 19,5% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai oleh Norwegia (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti dan yang dialokasikan untuk CSO tetap stabil sebagai bagian dari ODA bilateral, di sekitar 26,5%.<sup>76</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Norwegia kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.



Tabel 7. Alokasi pendanaan Norwegia kepada CSO<sup>77</sup>

## 2.8. Pendanaan CSO di Australia

Relasi antara negara dengan masyarakat sipil di Australia dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini memengaruhi pendanaan dari sektor publik kepada CSO dan sekaligus keberadaan CSO. Pengalaman di negeri ini memperlihatkan

<sup>76</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/aaf0304f-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oece&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/aaf0304f-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oece&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)

<sup>77</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

perbedaan tajam dengan prinsip subsidiaritas yang kuat mewarnai relasi negara dan masyarakat sipil seperti di Belanda dan Jerman.

Ada suatu periode rumah sakit nirlaba dan ramah pada masyarakat memainkan peran yang jauh lebih besar dalam perawatan kesehatan dibandingkan saat ini. Pemerintah pada masa awal migrasi dari Inggris lebih mendorong penyediaan layanan sosial dan perawatan rumah sakit oleh organisasi amal yang didukung dana publik daripada menangani sendiri. Ada kecenderungan pemerintah memperbesar dana publik seiring perkembangan cakupan layanan rumah sakit. Namun, seiring waktu, naiknya besaran dana publik yang dinikmati oleh organisasi ini, terutama pada abad ke-20, ada kecenderungan pemerintah ikut campur secara langsung dalam pengelolaannya.<sup>78</sup>

Mengikuti tradisi kebijakan mendorong peningkatan besar dalam pendanaan publik bagi inisiatif di tingkat masyarakat, tahun 1970-an dan 1980-an menandai pertumbuhan CSO yang tinggi dan sekaligus menghasilkan inovasi baru, yaitu organisasi layanan baru berbasis komunitas.<sup>79</sup> Jika pada masa lalu inovasi yang terus berkembang mengundang kehadiran pemerintah untuk menggelontorkan dana sekaligus ikut campur tangan dalam pengelolaannya, pada era mutakhir CSO menghadapi persaingan dengan organisasi berorientasi laba.

Pada tahun 1999, sektor masyarakat sipil melibatkan tenaga kerja yang cukup besar, setara 403.000 atau setara pekerja penuh waktu yang dibayar. Hal ini mewakili 7,2% dari semua pekerja non-pertanian, 15,3% pekerjaan jasa, dan setara dengan 31,2% orang yang bekerja untuk pemerintah di semua tingkatan: federal, departemen, dan kota.<sup>80</sup>

Dua orang atau lebih bebas membentuk perkumpulan untuk mengejar tujuan apapun, asalkan tujuan itu tidak melanggar hukum. Tidak ada persyaratan untuk mendaftarkannya kepada otoritas pemerintah mana pun jika tujuan asosiasi selain untuk mencari keuntungan. "Asosiasi" digunakan sebagai istilah umum dalam undang-undang. Sedangkan, istilah "yayasan" biasanya digunakan untuk merujuk pada organisasi nirlaba, organisasi yang mencari dana untuk tujuan tertentu, seperti penelitian

---

<sup>78</sup> Mark Lyons, et al., 1999, "Australia," dalam Lester M. Salamon, et al. (eds), **Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector**, Baltimore, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, hal. 203

<sup>79</sup> Mark Lyons, et al., *op. cit.*, hal. 203

<sup>80</sup> Mark Lyons, et al., *op. cit.*, hal. 204

kesehatan atau sekolah.<sup>81</sup>

Mendaftarkan diri ke otoritas pemerintah akan memberikan insentif bagi CSO. Selain akan mendapatkan pemotongan pajak, Kantor Pajak Australia menyebutkan dana publik hanya bisa dioperasikan oleh organisasi amal terdaftar. Organisasi ini harus menjadi organisasi amal terdaftar di Australian Charities and Not-for-profits Commission (ACNC) dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Tax Concession Charity. ACNC adalah regulator nasional dan hingga tahun 2022 telah mendaftarkan dan mengatur 59.807 organisasi amal di Australia.<sup>82</sup> Organisasi amal ini hanyalah sebagian dari sekitar 600.000 CSO di Australia.

ACNC memiliki kerangka regulasi sebagai berikut, 1) *Australian Charities and Not-for-profits Commission Act 2012 (Cth)* (the ACNC Act); 2) *Australian Charities and Not-for-profits Commission (Consequential and Transitional) Act 2012 (Cth)* (the ACNC Consequential and Transitional Act); 3) *Australian Charities and Not-for-profits Commission Regulation 2013 (Cth)* (the ACNC regulations); 4) *Australian Charities and Not-for-profits Commission (Consequential and Transitional) Regulation 2016 (Cth)*; 5) *Charities Act 2013 (Cth)* (the Charities Act); 6) *Charities (Consequential Amendments and Transitional Provisions) Act 2013 (Cth)* (the Charities Consequential and Transitional Act); 7) *Charities (Definition of Government Entity) Instrument 2013* (dibuat di bawah subbagian 4 (2) of the Charities Act).<sup>83</sup>

Organisasi berorientasi pada laba memasuki banyak bidang yang sebelumnya dinikmati secara eksklusif oleh CSO. Hal ini terjadi pada saat kebijakan yang memberikan keistimewaan pada CSO telah ditarik oleh pemerintah yang melihat pendekatan pasar menjadi solusi. Bidang layanan sosial, yang sebelumnya merupakan kemitraan longgar antara pemerintah dengan CSO telah diganti. Muncul kemudian dorongan dari pemerintah terciptanya persaingan antara CSO untuk mendapatkan kontrak. Bukan ini saja, pemerintah juga mendorong terciptanya kompetisi antara CSO dengan

---

<sup>81</sup> Mark Lyons, 1998, "Defining the Nonprofit Sector: Australia," dalam Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier (eds.), *Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project*, no. 30, Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies, hal. 1

<sup>82</sup> <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/communities-and-vulnerable-people/programs-services/register-of-harm-prevention-charities/information-about-the-public-fund> (diakses pada 31 Januari 2022)

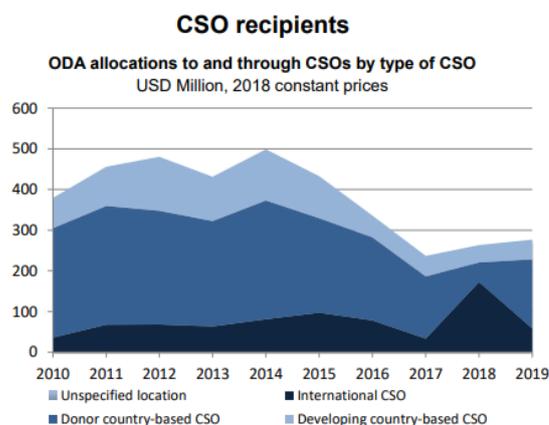
<sup>83</sup> <https://www.acnc.gov.au/about/acnc-legislation> (diakses pada 31 Januari 2022)

organisasi berorientasi laba.<sup>84</sup>

Lewat ACNC, CSO dapat mengakses dana publik, baik di pemerintah nasional dan federal untuk kepentingan pembangunan dalam negeri dan DFAT untuk implementasi kerja sama pembangunan di negara-negara tujuan ODA dan masuk dalam kerangka Australian NGO Cooperation Program (ANCP). Setiap tahun, ANCP mendukung lebih dari 55 CSO Australia dan lebih dari 2.000 mitra lokal untuk melaksanakan sekitar 400 proyek di sekitar 50 negara dalam bentuk hibah.<sup>85</sup>

Pada tahun 2019, CSO menerima 265,4 juta dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 2% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 10,2% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti dan yang dialokasikan untuk CSO sedikit meningkat sebagai bagian dari ODA bilateral, dari 10,3% menjadi 11,9%

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Australia kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.



Tabel 8. Alokasi pendanaan Australia kepada CSO<sup>86</sup>

## 2.9. Pendanaan CSO di Jepang

Pemerintah Jepang bergerak cepat memberikan dukungan pada CSO sebagai langkah tindak lanjut atas survei yang dikerjakan Badan Lingkungan

<sup>84</sup> Mark Lyons, *et al.*, *op. cit.*, hal. 216

<sup>85</sup> Australian NGO Cooperation Program (ANCP), <https://www.dfat.gov.au/development/who-we-work-with/ngos/ancp/australian-ngo-cooperation-program> (diakses pada 1 Februari 2022)

<sup>86</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

Hidup, persis sesudah berlangsungnya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992.

Lebih dari 60% responden yang mewakili CSO yang bekerja pada isu lingkungan hidup, baik di dalam maupun luar negeri mengatakan mereka memiliki keterbatasan dan sumber daya manusia.<sup>87</sup> Kendala keuangan ini secara langsung berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia. CSO kekurangan pekerja yang kompeten dengan gaji yang stabil yang sangat penting untuk pengembangan organisasi. Tanpa keamanan gaji yang stabil dan kompetitif, pekerja yang baik cenderung pergi. Sementara, banyak orang Jepang bersedia menjadi sukarelawan, namun belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan CSO.<sup>88</sup>

Pada bulan Juni 1994 berdiri Divisi Bantuan untuk NGO di bawah Kementerian Luar Negeri untuk menjawab harapan yang muncul dari survei di atas. Divisi ini merupakan hasil pengembangan pusat khusus untuk mendukung kegiatan CSO yang didirikan pada 1989 dengan jumlah dana awal sebesar 1 juta dolar AS. Peningkatan anggaran di Divisi Bantuan untuk CSO sangat dramatis. Pada tahun anggaran 1993 divisi tersebut menyumbangkan 3,7 juta dolar AS untuk kegiatan CSO dan menganggarkan untuk menyumbang 5,4 juta dolar AS pada tahun anggaran 1994. Selain itu, divisi tersebut memberikan kontribusi 7,7 juta dolar AS kepada CSO untuk operasi pada tahun anggaran 1993 dan 8,7 juta dolar AS pada tahun anggaran 1994.<sup>89</sup>

CSO telah menjadi aktor penting sejak akhir 1990-an dan didirikan di bawah Undang-undang untuk mempromosikan kegiatan nirlaba tertentu, (Undang-undang NPO). Mereka adalah produk dari gerakan sosial Jepang setelah gempa bumi besar Hanshin tahun 1995. Kurang efektifnya upaya birokrasi pemerintah dalam menangani tragedi ini tidak seberapa dibandingkan dengan kerja keras 1 juta relawan. Hal ini kemudian berujung pada pelembagaan NPO berbasis relawan pada tahun 1998. Hampir 70.000 CSO tumbuh selama dua dekade terakhir pasca-terbitnya undang-undang ini. CSO semakin bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial masyarakat

---

<sup>87</sup> Atsushi Yamakoshi, "The Changing Face of NGOs in Japan," <https://www.gdrc.org/ngo/jpngo-face.html> (diakses pada 1 Februari 2022)

<sup>88</sup> Hiroshi Ito, 2017, "Are Professional Nonprofits more Marketing Oriented? Evidence from a Survey of NPOs in Japan," dalam *The Nonprofit Review*, Vol.17, No.2, hal. 92

<sup>89</sup> Atsushi Yamakoshi, "The Changing Face of NGOs in Japan," <https://www.gdrc.org/ngo/jpngo-face.html> (diakses pada 1 Februari 2022)

lokal, menjadi semakin signifikan baik dalam memberikan layanan maupun menciptakan perubahan sosial untuk lebih memenuhi kebutuhan pengguna layanan yang muncul.<sup>90</sup>

Standar ketat hukum perdata Jepang mempersulit pembentukan CSO. Para pendiri harus mendapatkan otorisasi dari pemerintah pusat sebelumnya. Status bebas pajak yang dinikmati oleh CSO di banyak negara umumnya memakan waktu dua atau tiga tahun. Oleh karena itu, banyak calon CSO di Jepang lebih memilih status yang tidak ditentukan oleh hukum.<sup>91</sup> Hal ini mengakibatkan jumlah CSO di Jepang tergolong sedikit untuk ukuran negara maju, kendati telah mengalami peningkatan tajam sesudah pemberlakuan UU NPO.<sup>92</sup>

Kerangka regulasi di atas memperlihatkan hubungan yang tidak cukup ramah antara negara dengan masyarakat sipil. CSO di Jepang diatur dalam sejumlah regulasi, yaitu 1) Konstitusi Jepang (1946); 2) Hukum Perwalian Pasal 66 (1923) [pengaturan perwalian amal publik]; 3) Undang-undang Pajak Perusahaan (1965); 4) Hukum Sekolah Swasta, Pasal 3 (1949); 4) Hukum Pokok Pendidikan, Pasal 3 (1947); 5) UU Korporasi Agama, Pasal 4 (1951); 6) Hukum Bisnis Kesejahteraan Sosial, Pasal 22 (1951); 7) Hukum Perusahaan Kedokteran, Pasal 39 (1950); 8) Rehabilitasi Hukum Perusahaan (1995); 10) UU Otonomi Daerah 260(2) (1991); 9) Hukum untuk Mempromosikan Aktivitas Nirlaba Tertentu (2003); 10) UU Perhimpunan dan Yayasan, UU tentang Pengakuan Organisasi sebagai Kepentingan Umum, dan UU Penggabungan UU yang Relevan (2008); 11) Hukum pajak Ordonansi Penegakan Hukum Pajak Penghasilan.<sup>93</sup>

Sebagian besar CSO bergantung pada pendanaan eksternal, misalnya, dana publik, hibah dari yayasan amal, dan sumbangan langsung. Meskipun rata-rata CSO Jepang mendapatkan dua per tiga dari total pendapatan mereka dari kegiatan yang berhubungan dengan bisnis, sebagian besar kegiatan ini adalah bisnis konsinyasi yang didanai oleh pemerintah Jepang, dan menghasilkan sedikit atau tidak ada sama sekali pendapatan

---

<sup>90</sup> Akihiro Ogawa, 2020, "Japanese NPOs and the State Re-examined: Reflections Eighteen Years On," dalam David Chiavacci, et al. (eds), *Civil Society and the State in Democratic East Asia: Between Entanglement and Contention in Post High Growth*, Amsterdam: Amsterdam University Press, hal. 9

<sup>91</sup> Atsushi Yamakoshi, "The Changing Face of NGOs in Japan," <https://www.gdrc.org/ngo/jpngo-face.html> (diakses pada 1 Februari 2022)

<sup>92</sup> Nobuko Kawashima, 2001, "The Emerging Nonprofit Sector in Japan: Recent Changes and Prospects," dalam *The Nonprofit Review*, Vol. 1, No. 1, hal. 5-14

<sup>93</sup> [https://www.gdrc.org/ngo/jp-NPO\\_laws.html](https://www.gdrc.org/ngo/jp-NPO_laws.html) (diakses pada 1 Februari 2022)

komersial. Hanya sedikit CSO beroperasi dengan menyandarkan diri mereka pendapatan yang dihasilkan oleh aktivitas mereka sendiri.<sup>94</sup> Peluang pendanaan dari sektor publik menjadi semakin terbuka seiring dengan kecenderungan pemerintah daerah di Jepang untuk mengalihdayakan sebagian layanan kesejahteraan. Mereka menganggap cara ini dapat menjawab kebutuhan warga yang semakin beragam dengan cara yang lebih murah.<sup>95</sup>

Kemitraan dalam negeri dan mekanisme pendanaan bagi CSO dalam negeri mewarnai peran CSO dalam melaksanakan kerja sama pembangunan internasional di bawah Divisi Bantuan untuk NGO, Kementerian Luar Negeri Jepang. Secara garis besar, ada tiga jenis kemitraan, yaitu 1) Bantuan dana: Penyediaan dana yang diperlukan untuk kegiatan orang Jepang pada program CSO di luar negeri; 2) Penciptaan lingkungan yang mendukung bagi CSO: Mengacu pada kerja sama untuk membangun kapasitas CSO; 3) Dialog: Mendengarkan pendapat CSO tentang kebijakan ODA dan tentang kemitraan pemerintah-CSO dan memasukkan pendapat tersebut dalam kebijakan.<sup>96</sup> Kebijakan ini akan menjadi pijakan bagi JICA (Japan International Cooperation Agency) untuk implementasinya.

Pada tahun 2019, CSO menerima 234,1 juta dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 1% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 0,6% disalurkan melalui ODA untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti dan yang dialokasikan untuk CSO sedikit menurun sebagai bagian dari ODA bilateral, dari 1,7% menjadi 1,6%.<sup>97</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Jepang kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.

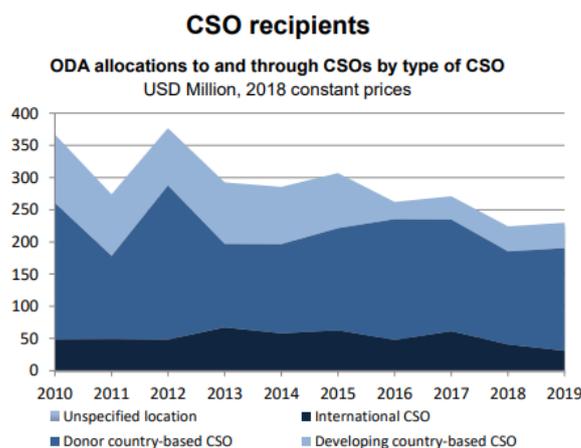
---

<sup>94</sup> Hiroshi Ito, 2017, "Are Professional Nonprofits more Marketing Oriented? Evidence from a Survey of NPOs in Japan," dalam *The Nonprofit Review*, Vol.17, No.2, hal. 91-92

<sup>95</sup> Kosuke Oyama, n.d., "The Public Service Governance in Japan: Is an NPO an Agent or a Partner?"

<sup>96</sup> Non-Governmental Organizations Cooperation Division, the Ministry of Foreign Affairs, "International Cooperation and NGOs Partnership between the Ministry of Foreign Ministry of Japan and Japanese NGOs," <https://www.mofa.go.jp/files/000024755.pdf> (diakses pada 1 Februari 2022)

<sup>97</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b8cf3944-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b8cf3944-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)



Tabel 9. Alokasi pendanaan Jepang kepada CSO<sup>98</sup>

## 2.10. Pendanaan CSO di Irlandia

Pendanaan awal dari sektor publik untuk sektor masyarakat sipil terjadi pada 1953. Undang-undang Kesehatan 1953 memberikan pengakuan peran CSO dan menetapkan dukungan untuk semua layanan rumah sakit, sehingga sebagian besar layanan kesehatan dapat diberikan kepada pasien secara gratis. Undang-undang ini juga memperkenalkan Hibah Bab 65 untuk CSO.<sup>99</sup>

Prinsip subsidiaritas yang diambil dari ajaran Gereja Katolik menjadi salah satu pijakan yang menopang relasi negara dan masyarakat sipil yang bermakna dan saling mengisi. Prinsip ini menyatakan bahwa tanggung jawab untuk penyediaan kesejahteraan sosial terutama terletak pada lembaga-lembaga seperti keluarga, sekolah, dan gereja. Negara dipandang sebagai upaya terakhir dan hanya hadir ketika lembaga-lembaga tersebut telah kehabisan sumber daya.

Dukungan negara terhadap inisiatif masyarakat sipil semakin membesar. **Pertama**, terjadi perubahan penekanan dalam ajaran sosial Katolik dan gereja mulai mendorong perluasan negara ke wilayah-wilayah yang secara tradisional disediakan oleh organisasi-organisasi sukarela. **Kedua**, pada tahun 1970-an, terjadi pergeseran penekanan dari 'amal' sebagai dasar upaya sukarela menjadi fokus pada keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terjadi seiring dengan dukungan oleh program anti-kemiskinan yang didanai Uni Eropa yang menekankan

<sup>98</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

<sup>99</sup> Brian Harvey, 2007, "Evolution Of Health Services and Health Policy In Ireland," Dublin, Combat Poverty Agency, hal. 7

ideologi pemberdayaan, partisipasi, dan inklusi sosial.<sup>100</sup>

Inilah salah satu alasan tingginya dana publik yang diberikan pada sektor masyarakat sipil dibandingkan negara-negara lainnya. Pada tahun 1995 sumbangan dana publik untuk CSO di Irlandia mencapai 74,5% dari total pendapatan. Sisanya berasal dari donasi dan pemasukan hasil dari jasa yang mereka peroleh.<sup>101</sup>

Peningkatan dana publik ini membawa konsekuensi pada bentuk relasi antara CSO dengan negara. Periode sebelum hingga tahun 1970-an ditandai keberadaan CSO yang sebagian besar didukung gereja Katolik dalam memberikan pelayanan sosial dengan pertanggungjawaban terbatas kepada negara. Sedangkan periode sesudah tahun 1970-an ditandai negara berperan lebih mendalam seiring meningkatnya dukungan keuangan kepada CSO dan tuntutan pertanggungjawaban CSO kepada negara.<sup>102</sup>

Negara juga ramah terhadap keberadaan CSO di Irlandia. Sesuai dengan kerangka legal, tidak seperti negara lain, tidak ada satu pun bentuk hukum di Irlandia yang khusus mengaturnya. Oleh karena itu, CSO di Irlandia dapat mengambil berbagai bentuk hukum atau dengan didirikan di bawah Charities Act 1973, meskipun tidak banyak CSO yang mengambil opsi ini.<sup>103</sup>

Dalam konteks kerja sama pembangunan internasional, dana publik dapat diakses CSO dari Irish Aid, yaitu program pemerintah Irlandia untuk pembangunan luar negeri. Program Hibah adalah pengaturan kemitraan berbasis kinerja dengan sejumlah CSO. Program ini dikelola oleh Divisi Kerja Sama Pembangunan Departemen Luar Negeri. Selain itu, mekanisme yang dilakukan adalah melalui proses pengadaan layanan. Irish Aid menggunakan proses pengadaan publik untuk melibatkan layanan dari penyedia layanan spesialis ketika pengetahuan atau keterampilan khusus tidak tersedia di Kementerian Luar Negeri dan Irish Aid.<sup>104</sup>

Saat ini, Irish Aid mendukung kerja masyarakat sipil di negara berkembang melalui sejumlah mekanisme, termasuk 1) Program kerja sama pembangunan di negara yang menjadi sasaran bantuan yang mencakup

---

<sup>100</sup> Freda Donoghue, Helmut K. Anheier, and Lester M. Salamon, 1999a, op. cit.

<sup>101</sup> Freda Donoghue, Helmut K. Anheier, and Lester M. Salamon, 1999b, "Ireland," dalam Lester M. Salamon *et al.* (eds), *Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector*, Baltimore, hal. 125

<sup>102</sup> Fred Powell and Donal Guerin, "The Irish Third Sector and Collaboration with the State: A Case Study on the Redefinition of Civic Virtue," [https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working\\_papers\\_geneva/Powell.pdf](https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Powell.pdf) (diakses pada 5 Februari 2022)

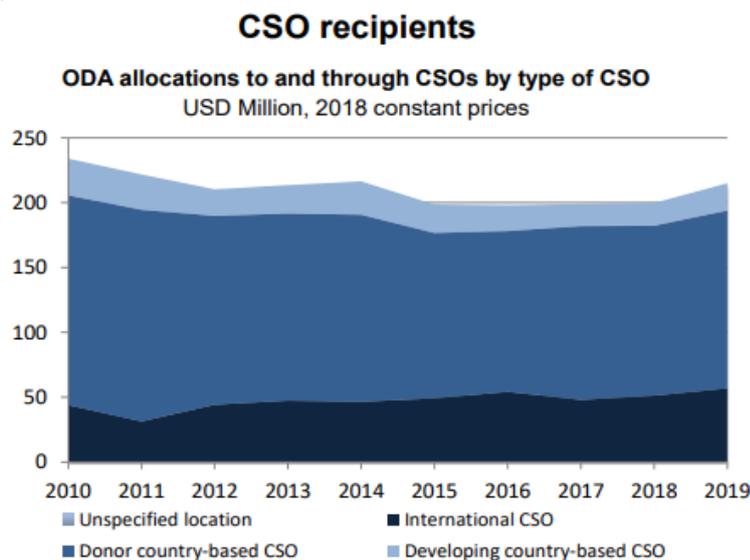
<sup>103</sup> Freda Donoghue, Helmut K. Anheier, and Lester M. Salamon, 1999a, op. cit.

<sup>104</sup> <https://www.irishaid.ie/about-us/> (diakses pada 1 Februari 2022)

komponen masyarakat sipil; 2) Skema pendanaan masyarakat sipil yang dikelola dari Irlandia, kantor pusat Irish Aid.<sup>105</sup>

Pada tahun 2019, CSO menerima 205,9 juta dolar AS dari ODA bilateral bruto. Sebesar 21% dari ODA bilateral bruto dialokasikan untuk CSO sebagai kontribusi inti (*core*) dan 15,6% disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (*earmarked*). Antara tahun 2018 dan 2019, kontribusi inti dan yang dialokasikan untuk CSO menurun sebagai bagian dari ODA bilateral, dari 37,7% menjadi 36,2%.<sup>106</sup>

Berikut adalah alokasi pendanaan negara Irlandia kepada CSO domestik, internasional CSO, maupun CSO yang berada di negara berkembang.



Tabel 10. Alokasi pendanaan Irlandia kepada CSO <sup>107</sup>

<sup>105</sup> Irish Aid, Department of Foreign Affairs, 2008, "Civil Society Policy," <https://www.irishaid.ie/news-publications/publications/publicationsarchive/2008/september/irish-aid-civil-society-policy/> (diakses pada 1 Februari 2022)

<sup>106</sup> [https://www.oecd-ilibrary.org/sites/941ec6f0-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&\\_csp\\_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter](https://www.oecd-ilibrary.org/sites/941ec6f0-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&_csp_=a3c0652ce31818d429f039149b4c3c13&itemIGO=oecd&itemContentType=chapter) (diakses pada 6 Februari 2022)

<sup>107</sup> OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member' reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)

Berikut adalah tabel mengenai bantuan pendanaan resmi pembangunan dari 10 negara, yang disalurkan ke dan melalui CSO.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Australia	123	163	73	145	165	140	115	6	48	39	1,017
Canada	33	51	34	38	51	56	59	25	31	35	413
Czech Rep.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Denmark	147	163	136	228	248	245	213	200	39	24	1,643
EU Institutions	0	0	3	4	8	9	11	12	21	14	82
Finland	13	12	14	15	30	36	19	24	23	23	209
France	2	1	0	2	0	15	14	22	17	18	91
Germany	0	0	0	0	0	706	831	828	913	898	4,176
Ireland	138	140	128	130	130	118	120	124	122	122	1,272
Italy	17	8	3	96	92	138	164	138	150	142	948
Japan	229	174	182	196	193	205	214	176	131	149	1,849
Korea	1	1	1	1	2	1	5	1	1	1	15
Luxembourg	23	7	8	21	19	14	32	27	18	18	187
Netherlands	199	43	40	65	73	109	119	107	94	87	936
New Zealand	20	14	15	13	16	15	16	13	11	17	150
Norway	238	242	231	255	255	270	257	264	264	261	2,537
Spain	43	12	3	2	4	2	1	1	1	1	70
Sweden	166	124	322	329	389	456	269	236	234	203	2,728
Switzerland	184	178	182	207	223	240	249	262	270	268	2,263
United Kingdom	363	501	505	513	569	559	433	487	474	471	4,875
United States	0	0	28	0	5	1	2	2	5	6	49
<b>TOTAL</b>	2,132	2,036	2,091	2,470	2,693	3,529	3,354	3,153	3,082	3,018	27,558

(USD million, disbursements, constant 2018 prices)

Tabel 11. Perbandingan bantuan pendanaan resmi pembangunan dari 10 negara yang disalurkan kepada CSO, 2010-2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
Australia	256	293	407	286	334	293	221	231	215	237	2,773
Canada	657	594	605	669	672	722	773	873	902	853	7,320
Czech Rep.	0	15	14	15	15	17	19	18	22	22	157
Denmark	273	258	324	226	229	217	197	264	435	492	2,915
EU Institutions	1,606	1,717	1,827	1,924	2,029	1,975	2,221	2,022	2,068	2,097	19,486
Finland	165	163	160	178	170	176	109	105	98	101	1,425
France	146	117	136	101	246	200	209	258	338	481	2,232
Germany	947	902	1,019	1,066	1,112	455	606	753	698	826	8,384
Ireland	96	82	82	83	87	80	78	75	78	93	834
Italy	69	95	62	51	79	82	45	93	130	107	813
Japan	138	99	194	97	93	102	48	95	93	81	1,040
Korea	20	25	28	29	34	41	37	47	39	47	347
Luxembourg	63	73	77	67	64	67	60	65	79	82	697
Netherlands	1,298	1,312	1,174	1,146	1,063	1,055	849	855	938	878	10,568
New Zealand	26	42	32	37	39	34	36	40	44	45	375
Norway	505	489	490	545	575	604	623	636	604	712	5,783
Spain	814	616	398	351	261	236	350	527	595	622	4,770
Sweden	602	712	575	612	595	538	730	863	937	988	7,152
Switzerland	326	350	421	459	530	609	576	552	553	579	4,955
United Kingdom	787	1,075	1,289	1,439	1,670	1,819	1,795	1,956	1,525	1,573	14,928
United States	7,306	7,412	6,758	6,784	7,093	7,574	7,814	7,401	6,835	6,535	71,512
<b>TOTAL</b>	16,328	16,656	16,262	16,372	17,164	17,094	17,593	17,952	17,434	17,715	170,570

(USD million, disbursements, constant 2018 prices)

Tabel 12. Perbandingan bantuan pendanaan resmi pembangunan dari 10 negara yang disalurkan melalui CSO, 2010-2019



# BAB 3

## REFLEKSI DAN PENUTUP

Secara ringkas, matriks di bawah memperlihatkan perbedaan sekaligus kesamaan di wilayah skema regulasi, jenis dan mekanisme pendanaan, dan entitas pengelola dana di 10 negara.

1. Kebijakan negara kepada pendanaan CSO. Hampir seluruh negara yang menjadi studi kasus melihat pentingnya keberadaan CSO dalam sistem dan institusi demokrasi. Hanya Jepang yang mengalami keterlambatan dalam memperkuat CSO. Sesuai dengan kerangka legal, atas alasan inilah hampir seluruh 10 negara tidak banyak membatasi keberadaan CSO. Mereka juga mendukung aktivitas yang dikerjakan CSO dalam bentuk limpahan dana publik, bahkan aktivitas CSO dalam menyuarkan kepentingan masyarakat sipil di hadapan negara yang seringkali dipandang sensitif, pemerintah tetap memberikan dukungan dana.
2. Mekanisme pendanaan negara kepada CSO. Ada kecenderungan pemerintah di 10 negara berusaha mengurangi biaya transaksi pada saat mendistribusikan dana publik kepada CSO. Beberapa pemerintah menggunakan organisasi payung untuk mengerjakan sebagian pekerjaan administrasi mereka dan menyalurkan dana publik kepada CSO. Sebagian pemerintah yang lain lebih memilih menyalurkan dana publik secara langsung kepada CSO dalam ukuran besar.
3. Entitas lembaga pengelola dana publik untuk CSO. Tidak semua 10 negara memiliki unit spesifik yang dikembangkan dalam pengelolaan dana publik yang digunakan untuk membiayai kegiatan CSO wilayah domestik. Dana publik tersebar di banyak kementerian dan lembaga pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, untuk dana publik yang menjadi bagian dari kerja sama pembangunan internasional, pemerintah di 10 negara cenderung menempatkan unit spesifik ini di bawah kementerian luar negeri.

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
1. Swedia	Tidak ada	<p>Kontribusi inti (<i>core</i>) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (<i>earmarked</i>).</p> <p>Penyaluran dana dilakukan hanya lewat organisasi payung yang membawahi CSO.</p>	Sida
2. Amerika Serikat	<p>The Foreign Agents Registration Act mengatur pengungkapan publik secara berkala kepada individu yang bekerja dengan organisasi asing; Executive Order 13224 mengatur pelarangan bagi organisasi mendapatkan pendanaan asing dari individu atau organisasi yang masuk dalam daftar organisasi atau individu terlarang.</p>	<p>Hampir tidak ada kontribusi inti (<i>core</i>) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (<i>earmarked</i>).</p> <p>Mekanisme implementasi: Host Country Managed Mechanisms, USAID Managed Mechanisms dan Third Party Managed Mechanisms.</p>	<p>United States Agency for International Development (USAID) dibentuk berdasarkan amanah the Foreign Assistance Act of 1961; National Endowment Democracy (NED) adalah yayasan nirlaba dan independen yang bekerja untuk membantu perkembangan dan penguatan demokrasi.</p>

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
3. Inggris	Diatur dalam Charities Act 2011 dan pendaftaran keberadaannya lewat Charity Commission.	<p>Kontribusi inti (<i>core</i>) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (<i>earmarked</i>).</p> <p>Untuk hibah: UK Aid Direct murni dari sektor public ditujukan bagi CSO ukuran kecil dan sedang; UK Aid Match berasal dari donasi masyarakat pemerintah; UK Aid Connect yang disalurkan lewat konsorsium.</p> <p>The Compact adalah rujukan kolaborasi antara CSO dengan pemerintah. Tugas pengelolaan dan pengawasan dilakukan oleh dua instansi pemerintah yaitu The Office for Civil Society dan Compact Voice.</p>	Sida
4. Korea Selatan	Diatur dalam undang-undang	Hampir tidak ada kontribusi inti ( <i>core</i> )	Korea International

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
	untuk Promosi Organisasi Sipil Nirlaba.	dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor ( <i>earmarked</i> ).	Cooperation Agency (KOICA).
5. Belanda	<p>Kebebasan berorganisasi dijamin Konstitusi, tetapi tetap menjadi subyek dari larangan UU yang dikeluarkan parlemen dalam kaitannya ketertiban umum.</p> <p>CSO harus didaftarkan sebagai yayasan atau perkumpulan. Penggalangan dana diatur secara sendiri oleh Regulator Penggalangan Dana (CBF).</p> <p>RUU Transparansi yang mengharuskan CSO untuk memublikasikan donasi sebesar 15 ribu Euro per tahun.</p>	Kontribusi inti ( <i>core</i> ) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor ( <i>earmarked</i> ).	Bantuan Pembangunan Belanda (NEDA).
6. Jerman	Diatur dalam 1) Konsitusi	Kontribusi inti ( <i>core</i> ) dan disalurkan	Kementerian Federal untuk

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
	<p>(Grundgesetz); 2) Kode Sipil Federal (Bürgerliches Gesetzbuch); 3) Hukum Perkumpulan (Vereinsgesetz) yang ditetapkan pada tahun 1964; dan 4) Hukum tentang Yayasan di 16 negara bagian Jerman (Bundesländer).</p>	<p>melalui CSO untuk melaksanakan program yang mereka prakarsai dan yang telah mereka ajukan pendanaannya (<i>earmarked</i>).</p>	<p>Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) hanya bertanggung jawab untuk mengembangkan program secara keseluruhan, konsultasi, dan negosiasi. Tanggung jawab untuk implementasi jatuh ke berbagai organisasi dan lembaga pemerintah, swasta dan non-pemerintah di tingkat federal, negara bagian dan komunal.</p>
7. Norwegia	<p>Tidak ada regulasi yang mengatur keberadaan CSO.</p>	<p>CSO harus masuk dalam Daftar Publik untuk dapat berpartisipasi dalam Akar Rumput (<i>Grasrotandelen</i>), yang telah menjadi elemen utama dalam pembiayaan CSO lokal.</p>	<p>Norad.</p>

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
		Kontribusi inti ( <i>core</i> ) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai oleh Norwegia ( <i>earmarked</i> ).	
8. Australia	Tidak diatur.	<p>Dana publik hanya bisa dioperasikan oleh CSO yang terdaftar di Australian Charities and Not-for-profits Commission (ACNC) dan telah mendapatkan pengesahan sebagai Tax Concession Charity.</p> <p>Kontribusi inti (<i>core</i>) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor (<i>earmarked</i>).</p>	DAFT (Department of Foreign Affairs and Trade).
9. Jepang	Diatur dalam 1) Konstitusi Jepang 1946); 2) Hukum Perwalian Pasal 66 (1923) [pengaturan perwalian amal publik]; 3) Undang-	Kontribusi inti ( <i>core</i> ) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai donor ( <i>earmarked</i> ).	Divisi Bantuan untuk NGO di bawah Kementerian Luar Negeri; JICA (Japan International

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
	<p>Undang Pajak Perusahaan (1965); 4) Hukum Sekolah Swasta, Pasal 3 (1949); 4) Hukum Pokok Pendidikan, Pasal 3 (1947); 5) UU Korporasi Agama, Pasal 4 (1951); 6) Hukum Bisnis Kesejahteraan Sosial, Pasal 22 (1951); 7) Hukum Perusahaan Kedokteran, Pasal 39 (1950); 8) Rehabilitasi Hukum Perusahaan (1995); 10) UU Otonomi Daerah 260(2) (1991); 9) Hukum untuk Mempromosikan Aktivitas Nirlaba Tertentu (2003); 10) UU Perhimpunan dan Yayasan, UU tentang Pengakuan Organisasi sebagai Kepentingan Umum, dan UU Penggabungan UU yang Relevan (2008); 11) Hukum pajak Ordonansi Penegakan Hukum Pajak Penghasilan.</p>	<p>melaksanakan program yang diprakarsai donor (<i>earmarked</i>).</p>	<p>Cooperation Agency).</p>

Negara	Skema Regulasi Terkait CSO	Jenis dan Mekanisme Pendanaan	Entitas Pengelola Dana Publik untuk CSO
10. Irlandia	CSO di Irlandia dapat mengambil berbagai bentuk hukum atau dengan didirikan di bawah Charities Act 1973. Kendati tidak banyak CSO yang mengambil opsi ini.	<p>Hibah untuk CSO diatur secara spesifik dalam Undang-undang Kesehatan 1953 Bab 65.</p> <p>Kontribusi inti (<i>core</i>) dan disalurkan melalui CSO untuk melaksanakan program yang diprakarsai oleh donor (<i>earmarked</i>).</p>	Irish Aid.

Tabel 13. Matriks komparasi praktik pendanaan negara kepada CSO di 10 negara

# DAFTAR PUSTAKA

- Anheier, Helmut K. and Wolfgang Seibel, 1993, "Defining the Nonprofit Sector: Germany," Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 6. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies
- Australian NGO Cooperation Program (ANCP), <https://www.dfat.gov.au/development/who-we-work-with/ngos/ancp/australian-ngo-cooperation-program> (diakses pada 1 Februari 2022)
- Bahagijo, Sugeng, Bagus Takwin, Hamong Santono dan AH Maftuchan, 2014, Laporan Kajian Trust Fund/Dana Perwalian dan Pendanaan CSO untuk Demokrasi di Indonesia, Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
- Billing, Annika, 2011, "Support to Civil Society within Swedish Development Cooperation," School of Global Studies, University of Gothenburg, Perspectives No. 20
- Center for Frivilligt Socialt Arbejde, n. d., "Civil societies in the Nordic Region – Extracts from the Knowledge Base,"
- Chiavacci, David, et al. (eds), Civil Society and the State in Democratic East Asia: Between Entanglement and Contention in Post High Growth, Amsterdam: Amsterdam University Press
- CIVICUS and the Irish Council for Civil Liberties, 2018, "Regulating Political Activity of Civil Society"
- Czulno, Patryk, n.d., "Civil Society in the Netherlands and Poland: Learning from the Dutch?"
- Engel, Susan, 2017, "Germany's Government-Civil Society Development Cooperation Strategy: The Dangers of the Middle of the Road," *Cosmopolitan Civil Societies: an Interdisciplinary Journal*, Vol. 9, No. 1
- Executive Order 13224, Blocking Property and Prohibiting Transactions With Persons Who Commit, Threaten To Commit, or Support Terrorism
- Fakih, Mansour. NGOs in Indonesia: Issues in Hegemony and Social Change. Occasional Paper Series on Non-Governmental Organizations.

- Center for International Education, University of Massachusetts Amherst, 1991
- Feltenius, David and Jessika Wide, 2019, "Business as Usual? Civil Society Organizations in a Marketized Swedish Welfare State," *Journal of Civil Society*
- Government Communication 2013/14:131, "Aid Policy Framework"
- Government Offices of Sweden, "A policy for civil society," Fact Sheet, November 2010
- Habraken, Rik, et al., 2013, "Dutch Civil Society at Crossroads," *Development in Practice*, DOI: 10.1080/09614524.2013.801398.
- Harvey, Brian, 2007, "Evolution Of Health Services and Health Policy In Ireland," Dublin, Combat Poverty Agency
- Henriksen, Lars Skov, Kristin Strømsnes, and Lars Svedberg, 2019, "Understanding Civic Engagement in the Scandinavian Context," dalam Lars Skov Henriksen, Kristin Strømsnes, Lars Svedberg (eds.), *Civic Engagement in Scandinavia Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden*. Springer, Nonprofit and Civil Society Studies, An International Multidisciplinary Series
- <https://ecnl.org/news/according-new-dutch-draft-act-csos-would-be-obliged-publish-personal-information-certain>
- <https://www.acnc.gov.au/about/acnc-legislation> (diakses pada 31 Januari 2022)
- <https://www.cof.org/country-notes/nonprofit-law-germany>
- <https://www.dss.gov.au/our-responsibilities/communities-and-vulnerable-people/programs-services/register-of-harm-prevention-charities/information-about-the-public-fund> (diakses pada 31 Januari 2022)
- [https://www.gdrc.org/ngo/jp-NPO\\_laws.htm](https://www.gdrc.org/ngo/jp-NPO_laws.htm) (diakses pada 1 Februari 2022)
- <https://www.irishaid.ie/about-us/> (diakses pada 1 Februari 2022)
- <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/0079f636-en/index.html?itemId=/content/component/8a6be3b3-en&>
- Local Government & Social Care Ombudsman UK, 2020, *Compacts Between Councils and Civil Society Organizations* <https://www.lgo.org.uk/make-a-complaint/fact-sheets/other-topics/compacts-between-councils-and-civil-society-organisations> (diakses 27 September 2021).

- Loga, Jill, 2018, "Civil Society and the Welfare State in Norway – Historical Relations and Future Roles," Oxford University Press and Community Development Journal
- Lundberg, Erik, 2020, "Toward a New Social Contract? The Participation of Civil Society in Swedish Welfare Policymaking, 1958–2012," *Voluntas*, 31:1371–1384, <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9919-0> diakses pada 27 Januari 2022
- Lyons, Mark , et al., 1999, "Australia," dalam dalam Lester M. Salamon, et al. (eds), *Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector*, Baltimore, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies.
- Lyons, Mark, 1998, "Defining the Nonprofit Sector: Australia," dalam Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier (eds.), *Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project*, no. 30, Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies.
- Min, Jesse, 2017, *The Sunshine Policy of South Korea*, <http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/min2/> (diakses 2 September 2021).
- Modéer, Pontus and Henrik Alffram, 2013, "Sweden Case Study: Swedish CSOs and Relationships with the Government of Sweden in Development Cooperation," *United Nations Development Programme, Working with Civil Society in Foreign Aid Possibilities for South-South Cooperation?* Beijing,
- National Endowment for Democracy, 2020, *Case Study: Variety of Actors, Program Support Change in Indonesia* <https://www.ned.org/about/how-we-work/case-study-variety-of-actors-programs-supports-change-in-indonesia/> (diakses 25 September 2021).
- National Endowment for Democracy, 2020, *NED's Grantmaking in 2020 is the Highest in 36-year History* <https://www.ned.org/ned-democracy-support-continues-october-2020/> (diakses 27 September 2021).
- National Endowment for Democracy, 2021, *About the National Endowment Democracy*, <https://www.ned.org/about/> (diakses 27 September 2021).
- National Endowment for Democracy, 2021, *Regions* <https://www.ned.org/regions/> (diakses 27 September 2021)
- Non-Governmental Organizations Cooperation Division, the Ministry of Foreign Affairs, "International Cooperation and NGOs Partnership between the Ministry of Foreign Ministry of Japan and Japanese

- NGOs,” <https://www.mofa.go.jp/files/000024755.pdf> (diakses pada 1 Februari 2022)
- OECD, 2020, Development Co-Operation Profiles: Korea, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/d919ff1a-en/index.html?itemId=/content/component/d919ff1a-en> (diakses 11 September 2021)
- OECD. April 2021. Aid for Civil Society Organizations: Statistic based on DAC Member’ reporting to the Creditor Reporting System database (CRS)
- Oyama, Kosuke, n.d., “The Public Service Governance in Japan: Is an NPO an Agent or a Partner?”
- Plowden, William, 2003, The Compact: Attempts to Regulate Relationships between Government and the Voluntary Sector in England, Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly, Vol. 32 No. 3
- Powell, Fred and Donal Guerin, “The Irish Third Sector and Collaboration with the State: A Case Study on the Redefinition of Civic Virtue,” [https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working\\_papers\\_geneva/Powell.pdf](https://cdn.ymaws.com/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Powell.pdf) (diakses pada 5 Februari 2022)
- Pratt, Brian, et al., 2006, “Official Agency Funding of NGOs in Seven Countries: Mechanisms, Trends and Implications,” INTRAC, Occasional Papers Series No: 46, August 2006
- Saglie, Jo and Karl Henrik Sivesind, 2018, “Civil Society Institutions or Semipublic Agencies? State Regulation of Parties and Voluntary Organizations in Norway,” *Journal of Civil Society*, 14:4, 292-310, DOI: 10.1080/17448689.2018.1518769
- Salamon, Lester M. and Helmut K. Anheier (eds), Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 23, Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies
- Salamon, Lester M. et al. (eds), 1999, *Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector*, Baltimore, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies
- Sator, Balazs, 2010, “International Practices on Funding Civil Society Organisations,” OSCE Project Co-ordinator in Ukraine
- Selle, Per, Kristin Strømsnes, and Jill Loga, 2018, “State and Civil Society: A Regime Change?” dalam Bernard Enjolras and Kristin Strømsnes (eds.), *Scandinavian Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway*.

- Scandinavia Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden
- Sugeng Bahagijo, Bagus Takwin, Hamong Santono dan AH Maftuchan, 2014, Laporan Kajian Trust Fund/Dana Perwalian dan Pendanaan CSO untuk Demokrasi di Indonesia, Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan
- Susan Engel, 2017, "Germany's Government-Civil Society Development Cooperation Strategy: The Dangers of the Middle of the Road," *Cosmopolitan Civil Societies: an Interdisciplinary Journal*, Vol. 9, No. 1
- The Development Assistant Committee, 2019, *Aid for Civil Society Organizations*, OECD
- The UK Government, 2010, *The Compact: The Coalition Government and civil society organisations working effectively in partnership for the benefit of communities and citizens in England*, [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/61169/The\\_20Compact.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61169/The_20Compact.pdf) (diakses 2 September 2021).
- The US Department of State, 2021, *Non Governmental Organizations (NGOs) in the United States*, <https://www.state.gov/non-governmental-organizations-ngos-in-the-united-states/>
- USAID, 2008, *USAID Implementing Mechanism*, USAID
- Vic Veldheer and Ary Burger, 1999, "The Netherlands: Key Features of the Dutch Nonprofit Sector," dalam Lester M. Salamon, et al. (eds), *Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector*, Baltimore, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, hal. 145-146
- William Plowden, 2003, *The Compact: Attempts to Regulate Relationships between Government and the Voluntary Sector in England*, *Non-Profit and Voluntary Sector Quarterly*, Vol. 32 No. 3

NGO in Special Consultative Status  
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540  
021 7819734, 7819735 info@infid.org www.infid.org

Follow Us :

